



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH
PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan dan guna mendukung percepatan pencapaian *Universal Acces* Tahun 2019 dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030 Bidang Air Minum dan Sanitasi, perlu dilakukan langkah-langkah dan tindakan yang terarah dalam pelaksanaan program pembangunan yang berkeadilan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2019-2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/Prt/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN TAHUN 2019-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bapelitbang adalah Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RAD AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembangaan dalam rangka mendukung percepatan pendekatan *Universal Acces* Tahun 2019 bidang air minum dan sanitasi.
7. Standar Pelayanan Minimum yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
8. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
9. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
11. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
12. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
13. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Pamsimas adalah sistem penyediaan air minum yang menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat setempat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Penajam Paser Utara.

BAB II

PENYUSUNAN, PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN

RAD AMPL TAHUN 2019-2023

Pasal 2

- (1) Berdasarkan Peraturan Bupati ini disusun RAD-AMPL Tahun 2019-2023.
- (2) Dokumen RAD AMPL Tahun 2019-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

RAD-AMPL Tahun 2019-2023 berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas Daerah untuk perluasan Program pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat selama Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 dalam rangka mendukung percepatan pencapaian *Universal Acces* Tahun 2019 dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Tahun 2030.

Pasal 4

RAD-AMPL Tahun 2019-2023 berfungsi sebagai:

- a. instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi Daerah jangka menengah;
- b. rencana peningkatan Kinerja pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan Pamsimas dan pendekatan kelembagaan;
- c. media internalisasi Program atau Kegiatan dengan pendekatan Pamsimas ke dalam Program atau Kegiatan PD yang menangani bidang penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan;
- d. acuan pengalokasian anggaran APBD bagi Program peningkatan Kinerja pelayanan penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan; dan
- e. acuan jumlah desa replikasi Program Pamsimas minimal untuk Tahun 2019 dan Tahun 2023.

Pasal 5

- (1) RAD-AMPL Tahun 2019-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk mendukung percepatan pencapaian *Universal Acces* Tahun 2019 dan target SPM bidang air minum dan sanitasi.
- (2) RAD-AMPL Tahun 2019-2023 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) RAD-AMPL Tahun 2019-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman yang harus digunakan dalam penyusunan:
 - a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. Rencana Kerja PD; dan
 - c. APBD.

BAB III

PELAKSANAAN RAD AMPL TAHUN 2019-2023

Pasal 6

RAD-AMPL Tahun 2019-2023 dilaksanakan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja PD, APBD, dan dapat melalui integrasi RAD-AMPL ke dalam Program/Kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 7

Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL Tahun 2019-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bersumber dari dana di luar APBD pelaksanaan Program/Kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Bapelitbang dan PD teknis terkait.

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan RAD AMPL Tahun 2019-2023 terbuka bagi, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah dengan pihak lainnya selaku penyandang dana.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan RAD-AMPL Tahun 2019-2023 tetap harus memperhatikan hasil Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RAD-AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir Tahun 2019, perubahan sasaran dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja PD berdasarkan laporan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan RAD-AMPL.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD AMPL TAHUN 2019-2023

Pasal 10

- (1) Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.
- (3) Hasil Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan penyusunan kebijakan RAD AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.
- (4) Kepala PD melakukan Pemantauan dan Evaluasi Program/Kegiatan RAD AMPL yang menjadi tanggung jawab PD masing-masing.
- (5) Dalam hal hasil Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan hasil, Kepala PD melakukan tindakan perbaikan atau penyempurnaan.
- (6) Kepala PD melalui tim teknis penyusun RAD AMPL menyampaikan hasil Pemantauan dan Evaluasi kepada Kepala Bapelitbang.
- (7) Kepala Bapelitbang melakukan Evaluasi terhadap laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi yang telah diolah tim teknis penyusun RAD AMPL.
- (8) Dalam hal Evaluasi dari hasil Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditemukan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan, Kepala Bapelitbang menyampaikan rekomendasi dan langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala PD.

- (9) Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan atau penyempurnaan kepada Kepala Bapelitbang.
- (10) Kepala Bapelitbang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) elaporkan hasil Pemantauan dan Evaluasi kepada Bupati.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui tim teknis penyusun RAD AMPL atas Kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan Daerah.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukannya tersebut.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 3 Juni 2021
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 3 Juni 2021

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MULIADI

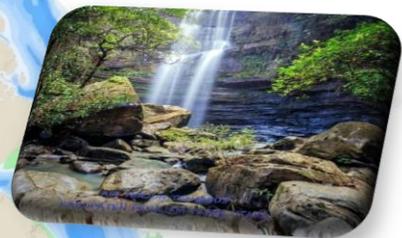
BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2021 NOMOR 20.



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH
PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN TAHUN 2019-2023



RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (RAD AMPL)



KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2019 - 2023

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel dan Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Air Minum dan Penyehatan lingkungan	I-3
1.3. Pengertian Air Minum dan Sanitasi	I-6
1.4. Maksud dan Tujuan	I-7
1.5. Ruang Lingkup RAD AMPL	I-8
1.6. Fungsi dan Kedudukan RAD AMPL.....	I-8
1.7. Sistematika Penulisan RAD AMPL	I-10
BAB II KONDISI UMUM PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN	
2.1. Gambaran Umum Wilayah.....	II-1
2.1.1. Kondisi Geografis, Administrasi dan Kondisi Fisik.....	II-1
2.1.2. Kondisi Demografi dan Kependudukan	II-11
2.2. Status Capaian Bidang Air Minum dan Sanitasi	II-15
2.2.1. Air Minum	II-15
2.2.2. Sanitasi	II-29
2.3. Permasalahan dan Tantangan	II-40
2.3.1. Permasalahan	
a. Permasalahan Terkait Air Minum.....	II-40
b. Permasalahan Terkait Sanitasi	II-44
1. Komponen Air Limbah.....	II-44
2. Komponen Persampahan.....	II-48
3. Komponen Drainase	II-51
2.3.2. Tantangan	
a. Air Minum	II-56
b. Sanitasi.....	II-58

BAB III	ISSUE STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
3.1.	Issue Strategis	III-1
3.2.	Arah Kebijakan 2019-2023	III-7
3.3.	Strategi Pencapaian 2019-2023	III-15
BAB IV	PROGRAM DAN KEGIATAN	
4.1.	Program dan kegiatan bidang Air Minum 2019-2023	IV-1
4.2.	Program dan Kegiatan di Bidang Sanitasi 2019-2023.....	IV-5
BAB V	KEBUTUHAN INVESTASI	
5.1.	Perkiraan Kebutuhan Investasi	V-1
5.2.	Rencana Pembiayaan.....	V-4
BAB VI	PEMANTAUAN DAN EVALUASI	
6.1.	Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi.....	VI-2
6.2.	Formulir Pemantauan dan Evaluasi.....	VI-4
BAB VII	PENUTUP	

Lampiran

- Matriks RAD AMPL Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Lembar Evaluasi Bedah RAD AMPL;
- TOR Lokakarya Expose Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Berita Acara Kesepakatan Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Kabupaten Penajam Paser Utara.

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 2.1.	Luas Wilayah Menurut Kecamatan 2018.....II-2
Tabel 2.2.	Wilayah Perkotaan dan Perdesaan di Kelurahan/Desa Kabupaten Penajam Paser UtaraII-4
Tabel 2.3	Penggunaan Lahan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 (dalam satuan Ha).....II-8
Tabel 2.4.	Jumlah Penduduk Tahun 2018 Kabupaten Penajam Paser Utara....II-11
Tabel 2.5.	Jumlah Penduduk Tahun 2018 dan Proyeksi Tahun 2023 Kabupaten Penajam Paser Uta.....II-12
Tabel 2.6.	Penduduk, Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018.....II-13
Tabel 2.7.	Potensi Air Permukaan Kabupaten Penajam Paser Utara.....II-16
Tabel 2.8.	Pemanfaatan Air Bersih Lainnya di Kabupaten Penajam Paser Utara.....II-17
Tabel 2.9.	Alternatif Sumber Air Baku.....II-20
Tabel 2.10.	Potensi Air Baku (Waduk) Di Kabupaten Penajam Paser Utara.....II-20
Tabel 2.11.	Data Pelanggan PDAM Kabupaten Penajam Paser Utara.....II-22
Tabel 2.12.	Potensi dan kapasitas sumber air baku di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018.....II-26
Tabel 2.13.	Jumlah Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum dan Sumber Air Bersih Lainnya Tahun 2018.....II-27
Tabel 2.14.	Cakupan Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Akses Air Minum Aman Tahun 2018.....II-27
Tabel 2.15.	Tingkat Pelayanan PDAM Tahun 2018 Kabupaten Penajam Paser Utara.....II-28
Tabel 2.16.	Jumlah Kepala Keluarga (KK) dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi yang Layak (Jamban Sehat) Tahun 2018.....II-30
Tabel 2.17.	Cakupan Pengelolaan Air Limbah Permukiman.....II-31
Tabel 2.18.	Cakupan Layanan Persampahan Eksisting Kabupaten Penajam Paser Utara.....II-34
Tabel 2.19.	Rasio Penduduk per TPS Menurut Kecamatan Tahun 2017 Kabupaten Penajam Paser Utara.....II-36
Tabel 2.20.	Luas Wilayah Rawan Genangan di Kabupaten Penajam Paser Utara.....II-39
Tabel 3.1.	Rekapitulasi penambahan cakupan akses terhadap air minum sampai dengan Tahun 2023III-30
Tabel 3.2.	Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Penajam Paser Utara sampai dengan Tahun 2023.....III-40
Table 3.3.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan AMPL Jangka Menengah Kabupaten Tahun 2019 – 2023 (SESUAI RPJMD).....III-14
Tabel 4.1.	Program dan Kegiatan di Bidang Air Minum 2019-2023.....IV-30
Tabel 4.2.	Program dan Kegiatan di Bidang Sanitasi 2019-2023.....IV-50
Tabel 5.1.	Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Air Minum.....V-20
Tabel 5.2.	Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Sanitasi.....V-20
Tabel 5.3.	Nilai Investasi Bidang AMPL 2019-2023 Kabupaten Penajam Paser Utara.....V-40
Tabel. 6.1.	Formulir Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL 2019-2023.....VI-40
Gambar 2.1.	Peta Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.....II-5
Gambar 2.2.	Peta Topografi Kabupaten Penajam Paser Utara.....II-7
Gambar 2.3.	Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Penajam Paser Utara.....II-10

Gambar 2.4.	Peta Sebaran Penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara.....II-14
Gambar 2.5.	Peta Sebaran Sumber Air Baku Kabupaten Penajam Paser Utara.....II-21
Gambar 2.6.	Cakupan Pelayanan Air Bersih Perpipaan Menurut Wilayah PelayananII-24
Gambar 2.7.	Peta Cakupan Pelayanan Air Limbah Kabupaten Penajam Paser Utara.....II-33
Gambar 2.8.	Peta Cakupan Pelayanan Persampahan Kabupaten Penajam Paser Utara.....II-38

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan berkah dan karunia-Nya jua lah sehingga Kabupaten Penajam Paser Utara dapat menyusun Dokumen Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) untuk Tahun 2019-2023 melalui Tim Penyusun RAD AMPL.

Air Minum dan Sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi salah satu tolak ukur dari kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, Dokumen RAD AMPL merupakan Dokumen Perencanaan pemenuhan Air Minum dan Sanitasi masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara.

Upaya perwujudan 100% akses air minum dan sanitasi ini juga merupakan Implementasi Pasal 12 Ayat 1 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa pelayanan air minum dan sanitasi merupakan kewenangan daerah dan menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pada pasal lainnya, yaitu Pasal 298 Ayat 1 disebutkan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dengan demikian belanja daerah untuk pemenuhan SPM pelayanan air minum dan sanitasi Kabupaten/Kota mutlak harus diprioritaskan. Jika dikaitkan dengan Target Nasional Akses Universal 2019, maka pemerintah kabupaten harus menyusun strategi, program, dan skema pembiayaan untuk penyediaan 100% akses air minum dan sanitasi kabupaten.

Sebagai langkah konkrit daerah, khususnya Kabupaten Penajam Paser Utara dalam pemenuhan kebutuhan air minum dan penyehatan lingkungan masyarakat, maka untuk tahun ini telah disusun Dokumen Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 – 2023. Penyusunan Dokumen tersebut difasilitasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis masyarakat (PAMSIMAS) melalui Pokja AMPL, Tenaga Ahli RAD AMPL dan Tim Penyusun RAD AMPL Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019-2023.

Tujuan dari penyusunan Dokumen RAD AMPL ini adalah 1) Rencana daerah dalam penyediaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan untuk periode 5 (lima) tahun; 2) Menjadi acuan bagi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab untuk bidang AMPL dan menjadi acuan bagi Pemda dalam pengembangan program AMPL dalam periode 5 (lima) tahun. Penyusunan Dokumen RAD AMPL harus sesuai dengan kebijakan dan strategi pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan sanitasi daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD atau dalam dokumen kebijakan dan strategi pengembangan SPAM dan dokumen kebijakan sanitasi Kabupaten Penajam Paser Utara.

Program Kegiatan yang termuat Dalam Dokumen RAD AMPL diharapkan Pendanaanya bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan Pihak swasta, Oleh sebab itu sangat diharapkan Dokumen RAD AMPL ini menjadi Dokumen yang dapat diimplementasikan setiap tahunnya dengan memperhatikan keuangan daerah dan dapat dilakukan evaluasi setiap tahunnya.

Di akhir kata, bersama ini kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Dokumen RAD AMPL Kabupaten Penajam Paser Utara ini, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan hikmah, petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua.

Aamiin Yaa Rabbal Alamin

Wassalam

TIM PENYUSUN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak tahun 2010, Pemerintah Indonesia menetapkan sejumlah kebijakan yang sangat mendukung percepatan kinerja pembangunan air minum dan sanitasi, antara lain Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan (mencakup Pro Rakyat, Keadilan untuk semua, Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium), Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 0445/M.PPN/11/2010 tentang 24 Nopember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Millenium Development Goals (RAD AMPL).

Berdasarkan kebijakan tersebut, peningkatan kinerja pembangunan air minum dan sanitasi menjadi salah satu prioritas nasional sampai dengan tahun 2019 ini. Dalam rangka memenuhi tanggung jawab pelaksanaan prioritas nasional tersebut, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menyusun Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) sebagai instrumen percepatan daerah dalam mencapai target Millenium Development Goals, khususnya target 7c yaitu menurunkan hingga setengahnya proporsi dasar hingga tahun 2019 serta merupakan instrumen pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Air Minum dan Air Limbah sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010

Untuk wilayah perdesaan, akses terhadap air minum dan sanitasi dibangun dengan platform Pamsimas. Sebagai platform, Pamsimas tidak hanya sebagai Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat, melainkan menjadi wadah sinkronisasi berbagai program dan anggaran pembangunan air minum dan sanitasi untuk perdesaan. Sebagai platform, Pamsimas mengkolaborasikan pendekatan berbasis masyarakat dan yang non berbasis masyarakat. Penerapan Pamsimas sebagai platform ini merupakan strategi nasional untuk percepatan pencapaian akses air minum aman dan sanitasi layak tahun 2019.

Pencapaian Pamsimas I dan II sebagai program, yang telah berhasil meningkatkan akses air minum dan sanitasi bagi warga perdesaan dan pinggiran kota di 12.000 desa yang tersebar di 233 kabupaten/kota, perlu dilanjutkan dengan upaya untuk menjadikan desa-desa dengan 100% akses air minum dan sanitasi dalam rangka penyediaan 100% akses air minum dan sanitasi kabupaten/kota. Upaya perwujudan 100% akses air minum dan sanitasi ini juga merupakan implementasi Pasal 12 Ayat 1 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa pelayanan air minum dan sanitasi merupakan kewenangan daerah dan menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pada pasal lainnya, yaitu Pasal 298 Ayat 1 disebutkan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal (SPM).

Dengan demikian, belanja daerah untuk pemenuhan SPM pelayanan air minum dan sanitasi kabupaten/kota mutlak harus diprioritaskan. Dikaitkan dengan target nasional akses universal 2019, maka pemerintah kabupaten/kota harus menyusun strategi, program, dan skema pembiayaan untuk penyediaan 100% akses air minum dan sanitasi kabupaten/kota.

Untuk memperkuat kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan mandatnya dalam pengelolaan pembangunan air minum dan sanitasi skala kabupaten/kota menuju 100% akses, pemerintah kabupaten/kota perlu memiliki kebijakan daerah yang jelas, terukur, dan dapat dilaksanakan/implementatif. Kebijakan daerah yang dimaksud mencakup penetapan target tahunan, strategi, program, rencana anggaran dan sumber pembiayaan yang dinamakan dengan Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Sanitasi (berikutnya disebut dengan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan/RAD AMPL).

1.2. Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Air Minum dan Penyehatan lingkungan.

Sesuai dengan kebijakan nasional yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, antara lain menyebutkan bahwa :

- a. Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan untuk menjamin hak rakyat atas air minum, akses terhadap pelayanan air minum, dan terpenuhinya Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari bagi masyarakat;
- b. Penyelenggaraan SPAM meliputi pengembangan SPAM dan pengelolaan SPAM. Penyelenggaraan SPAM wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Menteri;
- c. Pengembangan SPAM meliputi pembangunan baru, peningkatan dan perluasan;
- d. Pembangunan baru dapat dilakukan berdasarkan adanya kebutuhan pengembangan pembangunan yang meliputi belum tersedianya kapasitas, kapasitas terpasang sudah dimanfaatkan

secara optimal dan/atau kapasitas yang ada belum mencukupi kebutuhan;

- e. Peningkatan dilakukan melalui modifikasi unit komponen sarana dan prasarana terbangun untuk meningkatkan kapasitas;
- f. Perluasan dilakukan pada unit distribusi berdasarkan adanya kebutuhan perluasan cakupan pelayanan Air Minum kepada masyarakat;
- g. Pengelolaan SPAM meliputi operasi dan pemeliharaan

Sesuai dengan kebijakan nasional yang tercantum Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengembangan Air Minum, untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera baik di perkotaan maupun di perdesaan, maka dibutuhkan ketersediaan air minum yang memadai baik kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan. Secara umum, daerah perkotaan dan perdesaan yang dilayani oleh air minum yang berkualitas mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. Seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan air minum yang aman, baik di lingkungan perumahan, perdagangan, perkantoran, maupun tempat umum lainnya;
- b. Masyarakat dapat meminum air secara langsung dari SPAM dengan jaringan perpipaan, maupun bukan jaringan perpipaan;
- c. Masyarakat terlindungi dari berbagai penyakit terkait dengan air, seperti disentri, tipus, diare, dan sebagainya;
- d. Berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi;
- e. Masyarakat dapat menikmati peningkatan kesejahteraan dari pengusaha air minum yang efisien, profesional, dan terjangkau, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah;

- f. Masyarakat dan dunia usaha secara aktif dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM; dan
- g. Pemerintah Pusat dan Daerah bersama masyarakat bersama-sama mengamankan ketersediaan sumber air baku bagi keberlanjutan pelayanan SPAM.

Bidang Sanitasi memiliki program dan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kondisi masyarakat hidup sehat dan sejahtera dalam lingkungan yang bebas dari pencemaran air limbah permukiman. Air limbah yang dimaksud adalah air limbah permukiman (municipal wastewater) yang terdiri atas air limbah domestik (rumah tangga) yang berasal dari air sisa mandi, cuci dapur dan tinja manusia dari lingkungan permukiman serta air limbah industri rumah tangga yang tidak mengandung Bahan Beracun dan Berbahaya (B3). Air limbah permukiman ini perlu dikelola agar tidak menimbulkan dampak seperti mencemari air permukaan dan air tanah, disamping sangat beresiko menimbulkan penyakit seperti diare, typhus, kolera dan lain-lain

Beberapa upaya pencapaian sasaran RPJMN 2015 – 2019 , kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan meliputi :

- a. Peningkatan akses pelayanan sanitasi, baik melalui system on-site maupun off-site di perkotaan dan perdesaan.
- b. Peningkatan pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi .
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan system sanitasi.
- d. Penguatan kelembagaan.
- e. Pengembangan perangkat peraturan perundang-undangan.

1.3. Pengertian Air Minum dan Sanitasi

Sumber air minum yang layak meliputi air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber air minum layak meliputi air leding, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan;

Sumber air minum tak layak didefinisikan sebagai sumber air di mana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase;

Fasilitas sanitasi yang layak didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia.

Fasilitas sanitasi yang layak mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (flush toilet) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik, termasuk jamban cemplung (pit latrine) terlindung dengan segel slab dan ventilasi; serta toilet kompos;

Fasilitas sanitasi yang tidak layak antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember, dan toilet gantung;

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RAD-AMPL Kabupaten Penajam Paser Utara adalah untuk mewujudkan pembangunan sektor air bersih dan penyehatan lingkungan yang berkelanjutan berdasarkan kebutuhan dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara itu ada beberapa tujuan yang diharapkan dengan disusunnya RAD-AMPL Kabupaten Penajam Paser Utara, yaitu sebagai :

1. Rencana daerah dalam penyediaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan untuk periode 5 (lima) tahun;
2. Rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan AMPL serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat (PAMSIMAS);
3. Acuan bagi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab untuk bidang AMPL dan menjadi acuan bagi Pemda dalam pengembangan program AMPL dalam periode 5 (lima) tahun;
4. Dokumen yang memuat permasalahan dan isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas, serta indikasi kebutuhan investasi dalam penyediaan layanan air minum dan penyehatan lingkungan, baik yang berbasis lembaga maupun yang berbasis masyarakat, dalam rangka mendukung percepatan pencapaian target MDG's;
5. Dokumen yang harus sesuai dengan kebijakan dan strategi pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan sanitasi daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD atau dalam dokumen kebijakan dan strategi pengembangan SPAM dan dokumen kebijakan sanitasi kabupaten/kota.

1.5. Ruang Lingkup RAD AMPL

RAD-AMPL berisikan permasalahan dan isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas, serta indikasi kebutuhan investasi (pemerintah/APBD, masyarakat, swasta) dalam penyediaan layanan air minum dan penyehatan lingkungan, baik yang berbasis lembaga maupun yang berbasis masyarakat, dalam rangka mendukung percepatan pencapaian target MDGs.

Ruang lingkup RAD AMPL mencakup:

1. Penyediaan air minum rumah tangga;
2. Peningkatan cakupan penduduk yang menerapkan kebiasaan cuci tangan pakai sabun (CTPS) dan bebas buang air besar sembarangan (BABS);
3. Pengelolaan air limbah;
4. Pengelolaan limbah rumah tangga;
5. Penanganan pengelolaan kebersihan makanan.

1.6. Fungsi dan Kedudukan RAD AMPL

Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) adalah rencana daerah dalam penyediaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan untuk periode 5 (lima) tahun. RAD AMPL berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan AMPL serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat (Pamsimas). RAD AMPL akan menjadi acuan bagi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab untuk bidang AMPL dan menjadi acuan bagi Pemda dalam pengembangan program AMPL dalam periode 5 (lima) tahun.

RAD AMPL berfungsi sebagai:

Jika daerah telah memiliki suatu dokumen perencanaan yang memuat seluruh substansi yang harus ada dalam suatu RAD AMPL, maka daerah tersebut dikatakan telah memiliki RAD AMPL. Jika dokumen perencanaan yang ada belum memuat atau baru sebagian memuat substansi yang harus ada dalam suatu RAD AMPL, maka RAD AMPL harus disusun dengan mengakomodasi substansi yang masih relevan/valid dari dokumen sebelumnya untuk kemudian dilengkapi dengan substansi yang harus dimuat dalam suatu RAD AMPL.

Ciri utama dari RAD AMPL adalah memuat matriks program dan kegiatan dengan komitmen anggaran/investasi baik dari APBD, swasta, lembaga donor, dengan indikator dan target kinerja tahunan yang terukur dalam periode perencanaan lima tahun.

Selain itu, RAD AMPL juga adalah merupakan dokumen yang berfungsi sebagai “Channel” internalisasi program/ kegiatan dengan pendekatan PAMSIMAS ke dalam program/kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL, maka program kunci RAD AMPL adalah program-program yang berhubungan dengan:

1. Program peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum berbasis masyarakat
2. Program peningkatan akses penggunaan sanitasi yang layak
3. Program pemicuan perubahan perilaku (PHBS)
4. Program pengelolaan lingkungan
5. Program penguatan kelembagaan pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi di tingkat masyarakat.

1.7. Sistematika Penulisan RAD AMPL

Sistematika RAD AMPL disusun sehingga memudahkan Pemerintah Daerah untuk mengintegrasikan program dan kegiatan dalam RAD-AMPL ke dalam dokumen resmi perencanaan dan penganggaran daerah (RPJMD, RKPD).

Sistematika RAD AMPL adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan;

Bab ini memberikan penjelasan pentingnya penyusunan RAD AMPL bagi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, keterkaitan RAD AMPL dengan Dokumen Perencanaan lainnya (RPJMN dan RPJMD) serta keterkaitannya dengan proses penganggaran secara umum..

Bab I disusun dengan outline sbb:

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Air Minum dan Kesehatan lingkungan.
- 1.3 Pengertian Air Minum dan Sanitasi
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Ruang Lingkup Rencana Aksi Daerah
- 1.6 Fungsi dan Kedudukan RAD AMPL
- 1.7 Sistematika Penulisan RAD AMPL

Bab II Kondisi Umum Pencapaian, Permasalahan dan Tantangan;

Di dalam bab ini dikemukakan kondisi saat ini, permasalahan dan tantangannya di bidang Air Minum dan Sanitasi.. Bab II disusun dengan outline sbb:

- 2.1 Gambaran Umum Kabupaten Penajam Paser Utara
 - 2.1.1 Kondisi Geografis, Administrasi dan Kondisi Fisik
 - 2.1.2 Jumlah, Kepadatan, dan Pertumbuhan Penduduk
 - 2.1.3 Keuangan dan Perekonomian Daerah
- 2.2 Status Capaian Bidang Air Minum dan Sanitasi
 - 2.2.1 Air Minum
 - 2.2.2 Sanitasi dan Lingkungan Hidup
- 2.3 Permasalahan dan Tantangan
 - 2.3.1 Permasalahan

2.3.2 Tantangan

Bab III Issue Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi;

Bab ini mengemukakan Issue Strategis yang dihadapi terkait pengelolaan air minum dan sanitasi di Kabupaten Penajam Paser Utara baik issue teknis maupun non teknis, menjelaskan Arah Kebijakan dan Strategi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam lima tahun ke depan di bidang pengelolaan air minum dan sanitasi sebagaimana terdapat dalam RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara, Dokumen PPSP dan RPIJM Kabupaten Penajam Paser Utara. Bab III disusun dengan outline sbb:

- 3.1 Issue Strategis
- 3.2 Arah Kebijakan Bidang AMPL 2015-2019
- 3.3 Strategi Pencapaian Bidang AMPL 2015-2019

Bab IV Program dan Kegiatan;

Menjelaskan mengenai rencana program dan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Air Minum dan Sanitasi (fisik) dan kegiatan pendukungnya (non fisik), memberikan justifikasi tujuan dan manfaat setiap program. Bab IV disusun dengan outline sbb:

- 4.1 Program dan Kegiatan Bidang Air Minum 2019-2024
- 4.2 Program dan Kegiatan Bidang Sanitasi 2019-2024

Bab V Kebutuhan Investasi;

Bab ini menjelaskan mengenai perkiraan kebutuhan investasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Air Minum dan Sanitasi (fisik) dan kegiatan pendukungnya (non fisik) . Bab V disusun dengan outline sbb:

- 5.1 Perkiraan Kebutuhan Investasi
- 5.2 Rencana Pembiayaan

Bab VI Pemantauan dan Evaluasi;

Pada bab ini dikemukakan tentang mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk melihat target capaian dari pelaksanaan RAD AMPL. Mekanisme pemantauan dan evaluasi RAD AMPL menjelaskan tanggung jawab masing-masing SKPD, waktu pelaksanaan, dan langkah tindak lanjut. Koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi RAD AMPL dilakukan oleh Kepala Bappelitbangda Kabupaten Penajam Paser Utara. Bab III disusun dengan outline sbb:

- 6.1 Tujuan Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL
- 6.2 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL
- 6.3 Formulir Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL

Bab VII Penutup;

Pada bab akhir ini menyimpulkan hal-hal yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan dalam rangka mendukung RAD AMPL, termasuk rekomendasi dan saran untuk menggalang partisipasi dari berbagai pihak .

BAB II

KONDISI UMUM, PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

2.1 Gambaran Umum Wilayah

2.1.1. Kondisi Geografis, Administrasi dan Kondisi Fisik

Kabupaten Penajam Paser Utara secara geografis terletak antara 00°48'29" - 01°36'37" Lintang Selatan dan 116°19'30" - 116°56'35" Bujur Timur. Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki luas wilayah 3.333,06 Km² meliputi wilayah daratan seluas 3.060,82 Km² dan wilayah lautan seluas 272,24 Km². Kecamatan yang memiliki wilayah terluas yaitu Kecamatan Penajam yaitu 36,22% dari luas total wilayah kabupaten, dan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu Kecamatan Babulu yaitu 11,99% dari luas wilayah. Tabel 2.1 menyajikan luas wilayah Penajam Paser Utara menurut Kecamatan.

Kabupaten Penajam Paser Utara secara formal terbentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur , secara administratif memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu dan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan, dan Selat Makassar;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Longkali Kabupaten Paser dan Selat Makassar;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Longkali Kabupaten Paser dan Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat.

Dengan letak geografis dan administratif tersebut, maka Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki posisi yang sangat strategis sebagai wilayah yang dilalui jalur transportasi darat trans Kalimantan dan alur transportasi laut yang melalui Teluk Balikpapan sehingga memegang peranan penting dalam pergerakan barang dan jasa lintas wilayah antara Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, serta Kalimantan pada umumnya.

Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki 4 Kecamatan yang terdiri atas 30 Desa dan 24 Kelurahan. Kecamatan Penajam merupakan kecamatan dengan jumlah desa dan kelurahan terbanyak yaitu 4 desa dan 19 kelurahan, Kecamatan Waru dengan 3 desa dan 1 kelurahan, Kecamatan Sepaku memiliki 4 Kelurahan dan 11 desa, sedangkan Kecamatan Babulu memiliki 12 desa.

Luas wilayah Penajam Paser Utara menurut Kecamatan dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 2.1.
Luas Wilayah Menurut Kecamatan 2018

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)		Jumlah (Km ²)	Persentase (%)
	Darat	Laut		
Babulu	355,71	43,74	399,45	11,99
Waru	496,05	57,83	553,88	16,62
Penajam	1.036,70	170,67	1.207,37	36,22
Sepaku	1.172,36	0,00	1.172,36	35,17
Jumlah	3.060,82	272,14	3.333,06	100,00

Sumber: BPS, Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka 2018

Selain itu pembagian administratif wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara juga terdiri atas wilayah perkotaan dan perdesaan seperti tabel berikut :

Tabel 2.2.
Wilayah Perkotaan dan Perdesaan di Kelurahan/Desa Kabupaten Penajam Paser Utara

Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Nama Desa	Status wilayah	
PENAJAM	Tanjung tengah		Perdesaan	
	Saloloang		Perdesaan	
	Petung			Perkotaan
	Lawe - lawe		Perdesaan	
	Pejala		Perdesaan	
	Kampung baru		Perdesaan	
	Sesumpu		Perdesaan	
	Sungai parit		Perdesaan	
	Nipah - nipah		Perdesaan	
	Nenang			Perkotaan
	Penajam			Perkotaan
	Gunung seteleng		Perdesaan	
	Bulu minung		Perdesaan	
	Sotek			Perkotaan
	Sepan		Perdesaan	
	Riko		Perdesaan	
	Gersik		Perdesaan	
	Jenebora		Perdesaan	
	Pantai Lango		Perdesaan	
			Giri Mukti	
		Bukit Subur	Perdesaan	
		Sidorejo		Perkotaan
		Giripurwa		Perkotaan
WARU	Waru			Perkotaan
		Api - api	Perdesaan	
		Sesulu	Perdesaan	
		Bangun Mulya	Perdesaan	
BABULU		Babulu Darat	Perdesaan	
		Labangka	Perdesaan	
		Babulu Laut	Perdesaan	
		Gunung Intan	Perdesaan	
		Gunung Makmur	Perdesaan	
		Sebakung Jaya	Perdesaan	
		Rawa Mulia	Perdesaan	
		Sri Raharja	Perdesaan	
		Sumber Sari	Perdesaan	

Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Nama Desa	Status wilayah	
		Rintik	Perdesaan	
		Gunung Mulia	Perdesaan	
		Labangka Barat	Perdesaan	
SEPAKU	Sepaku		Perdesaan	
	Pemaluan		Perdesaan	
	Maridan			Perkotaan
	Mentawir		Perdesaan	
		Tengin Baru		Perkotaan
		Bukit Raya	Perdesaan	
		Suka Raja	Perdesaan	
		Bumi Harapan	Perdesaan	
		Argo Mulyo	Perdesaan	
		Semoi Dua	Perdesaan	
		Suko Mulyo	Perdesaan	
		Wonosari	Perdesaan	
		Karang Jinawi	Perdesaan	
		Binuang		Perkotaan
		Telemow		Perkotaan

Sumber: Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka 2018, Kecamatan dalam Angka 2018, BPS

Adapun Peta Wilayah dan Administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara beserta batas-batasnya ditunjukkan pada gambar peta berikut:

Gambar 2.1
Peta Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara



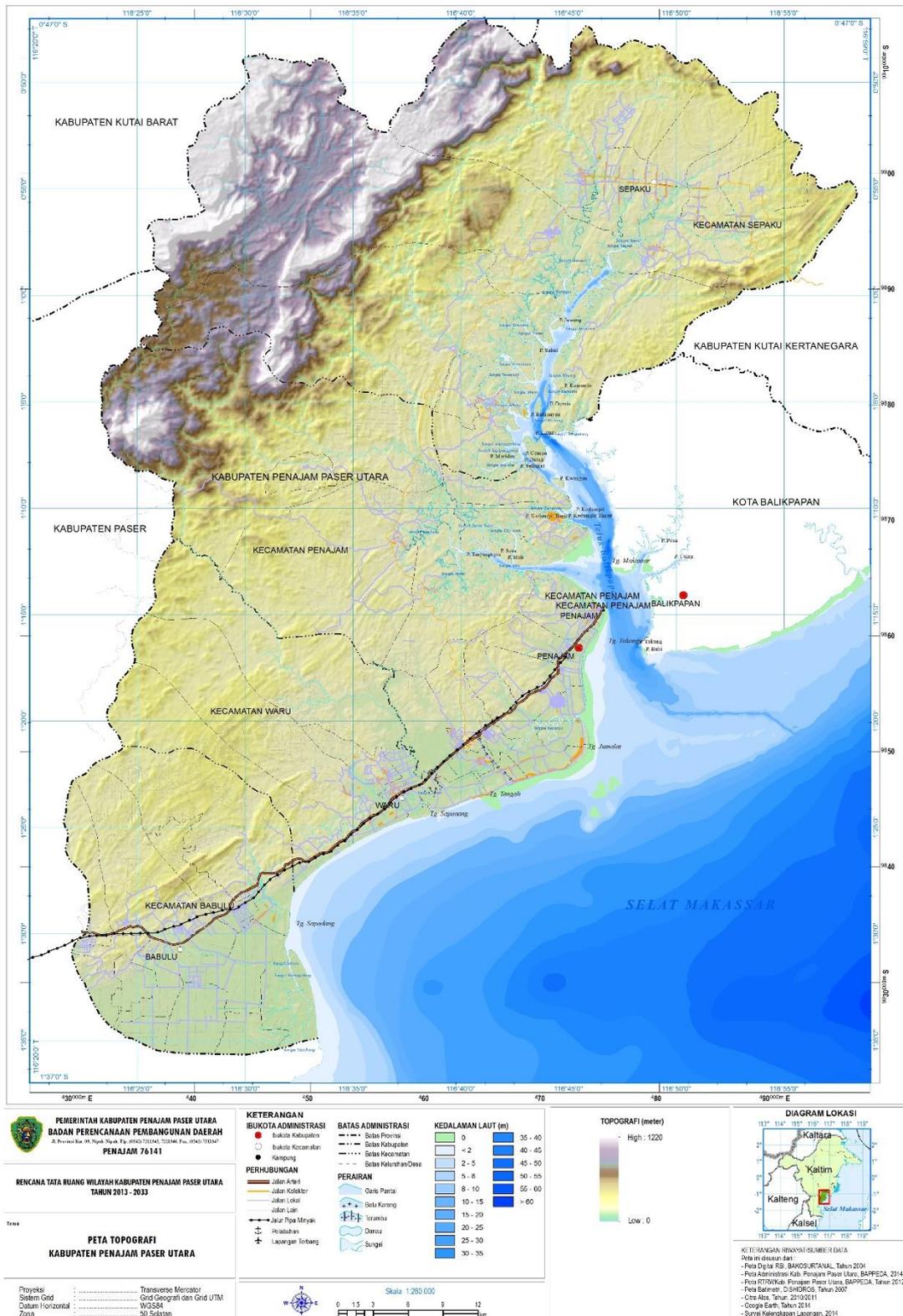
Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 – 2021 (Peta Dasar)

Pada umumnya ketinggian lereng di Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara berada pada 0 – 500 m diatas permukaan laut (dpl) pada elevasi terendah terdapat di daerah sekitar muara Sungai yang mengalir di Kabupaten Penajam Paser Utara. Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri atas wilayah berupa daratan dan wilayah yang berupa perairan laut. Wilayah perairan laut ini tersebar di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Babulu, Kecamatan Waru dan Kecamatan Penajam dimana ketiga kecamatan tersebut berbatasan langsung dengan Selat Makassar. Ditinjau dari kondisi topografi, dapat diketahui bahwa wilayah daratan Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri atas dataran dan perbukitan.

Wilayah daratan Kabupaten Penajam Paser Utara yang berupa dataran rendah dan perbukitan tersebut memiliki potensi dalam hal pengembangan pemanfaatan hasil produksi pertanian, perkebunan maupun usaha budidaya tanaman pangan lainnya. Selain itu dengan wilayah yang memiliki garis pantai dan wilayah perairan yang relatif luas, menyimpan potensi komoditas hasil laut yang bisa dikembangkan.

Adapun Peta Topografi Kabupaten Penajam Paser Utara ditunjukkan pada gambar peta berikut:

Gambar 2.2
Peta Topografi Kabupaten Penajam Paser Utara



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 – 2021 (Peta Tematik)

Penggunaan lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat diklasifikasikan sebagai berikut : Permukiman, Sawah, Pertanian Tanah Kering, Perkebunan, Kolam/Tambak, Industri, Pertambangan, Hutan lebat, Hutan belukar, Hutan sejenis, Hutan rawa, Semak belukar dan lain lain. Penggunaan lahan terbesar adalah untuk perkebunan yaitu sekitar 12.152,64 ha dan yang kedua adalah pertanian tanah kering yang menggunakan lahan sekitar 10.522,33 ha, dan untuk penggunaan lahan permukiman hanya menggunakan 3.190 ha. Untuk lebih jelasnya mengenai Penggunaan lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat di lihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.3
Penggunaan Lahan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017
(dalam satuan Ha)

NO.	PENGGUNAAN	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Pemukiman	2,808.00	2,808.00	2,808.00	2,920.00	3,190.00
2.	Sawah	4,715.00	4,715.00	4,715.00	4,713.35	4,709.95
3.	Pertanian Tanah Kering	10,740.00	10,740.00	10,727.84	10,704.33	10,522.33
4.	Perkebunan	12,217.00	12,217.00	12,208.89	12,194.64	12,152.64
5.	Kolam / Tambak	709.00	709.00	-	-	-
6.	Industri	290.00	290.00	4,790.00	4,794.90	5,019.90
7.	Pertambangan	48.00	48.00	-	-	-
8.	Hutan Lebat	188,175.00	188,175.00	-	-	-
9.	Hutan Belukar	50,075.00	50,075.00	-	-	-
10.	Hutan Sejenis	15,253.00	15,253.00	-	-	-
11.	Hutan Rawa	2,400.00	2,400.00	-	-	-
12.	Semak Belukar	18,320.00	18,320.00	18,313.92	18,303.23	18,039.23
13.	Lain – Lain	7,810.00	7,810.00	-	-	-

Sumber : BPS Kabupaten Penajam Paser Utara 2018

Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan daerah pesisir, sehingga banyak sungai yang bermuara pada selat Makasar antara Penajam Paser Utara dengan Balikpapan. Potensi air permukaan tanah di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara cukup besar bagi penduduk untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, yang tentunya

keberadaannya didukung dengan keberadaan sungai yang berfungsi sebagai daerah imbuhan air bawah tanah.

Adapun Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Penajam Paser Utara ditunjukkan pada gambar peta berikut:

2.1.2. Kondisi Demografi dan Kependudukan

Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2018 adalah 172.867 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak adalah di Kecamatan Penajam yakni 83.177 jiwa (26.244 KK) sedangkan jumlah penduduk paling sedikit adalah di Kecamatan Waru yakni 19.148 jiwa (6.002 KK).

Secara lengkap jumlah penduduk di Desa/Kelurahan Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dilihat pada tabel 2.3. berikut ini :

Tabel 2.4.
Jumlah Penduduk Tahun 2018 Kabupaten Penajam Paser Utara

NAMA KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK LAKI-LAKI	JUMLAH PENDUDUK PEREMPUAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KK
PENAJAM	43.160	40.017	83.177	26.244
WARU	9.905	9.243	19.148	6.002
BABULU	18.191	16.871	35.062	11.135
SEPAKU	18.387	17.093	35.480	11.552
	89.643	83.224	172.867	54.933

Sumber : Disdukcapil Kab.PPU tahun 2019

Tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara bervariasi di tiap-tiap kecamatan. Tingkat pertumbuhan tertinggi adalah di Kecamatan Penajam yakni 2,61% per tahun, sedangkan tingkat pertumbuhan penduduk paling sedikit adalah di Kecamatan Sepaku yakni sebesar 0,42% per tahun.

Sesuai dengan dinamika pertumbuhan penduduk tersebut maka proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2023 jumlahnya diperkirakan akan mencapai 190.730 jiwa. Selama 5 tahun di proyeksi kan akan ada penambahan penduduk sejumlah 17.863 jiwa atau sejumlah 10,33% (lihat tabel 2.5. berikut).

Tabel 2.5.
Jumlah Penduduk Tahun 2018 dan Proyeksi Tahun 2023
Kabupaten Penajam Paser Utara

Kecamatan	Perkotaan		Perdesaan		Total	
	2018	2023	2018	2023	2018	2023
Penajam	46.708	53.130	36.469	41.483	83.177	94.613
Waru	12.528	14.879	6.620	7.862	19.148	22.742
Babulu	13.432	14.229	21.630	22.914	35.062	37.143
Sepaku	13.755	14.046	21.725	22.185	35.480	36.231
	86.423	96.285	86.444	94.445	172.867	190.730

Sumber : Disdukcapil Kab.PPU tahun 2018

Sebaran Penduduk

Secara umum kepadatan penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara relatif rendah. Dari ke-empat kecamatan yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kecamatan Babulu merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi, pada tahun 2018 kepadatan mencapai 88 jiwa/km². Disusul Kecamatan Penajam dengan kepadatan 69 jiwa/km² dan Kecamatan Sepaku adalah kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah diantara kecamatan lain yaitu 30 jiwa/km². Secara rinci kepadatan penduduk disajikan pada tabel berikut.

Permukiman penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara tersebar tidak merata. Konsentrasi penduduk secara umum terdapat di 4 titik utama yakni, di kawasan Ibukota Kabupaten (Kec.Penajam) di Kel.Penajam, Kel.Petung; Kel.Waru (Kec.Waru); Desa Babulu Darat (Kec.Babulu); Kel.Maridan (Kec.Sepaku) eks lokasi PT.ITCI. sedangkan

di desa/kelurahan lain konsentrasi permukiman penduduk tersebar secara sporadik.

Tabel 2.6.
Penduduk, Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk
Menurut Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2018

Kecamatan	Luas Wilayah (Km²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/Km)
Penajam	1.207,37	83.177	69
Waru	553,88	19.148	35
Babulu	399,45	35.062	88
Sepaku	1.172,36	35.480	30

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Penajam Paser Utara, 2018

Sebaran penduduk menurut wilayahnya dapat dilihat pada gambar berikut:

2.2 Status Capaian Bidang Air Minum dan Sanitasi

2.2.1. Air Minum

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyatakan bahwa indikator SPM bidang air minum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari dengan target Tahun 2019 adalah 81,77%.

Sumber Air Baku yang dimanfaatkan PDAM Kec. Penajam untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi penduduk di Kecamatan Penajam berasal dari Air Permukaan yaitu Sungai Lawe-Lawe, dengan jarak ke area pelayanan sekitar 7 Km yang pemanfaatannya ke sekitar Kecamatan Penajam dimana untuk pemanfaatan baku airnya berkisar 60,4 l/dtk, dengan Total volume produksi sebesar 1.905.642 m³/tahun berdasarkan laporan PDAM tahun 2015 dengan kualitas air sedang

Meskipun memiliki curah hujan yang tinggi dan tersebar di setiap bulan sepanjang tahun, tidak seluruh sungai-sungai di daerah ini merupakan sungai-sungai permanen yang selalu ada airnya atau mengalirkan air sepanjang waktu. Hanya air dari sungai-sungai yang secara kuantitas cukup tersedia tentu merupakan potensi utama sebagai air baku. Seperti halnya potensi air dari sungai, potensi air dari danau juga tidak terlalu banyak dijumpai. Kebanyakan danau di wilayah kabupaten bagian tengah yang masih diperlukan lebih lanjut untuk dijadikan sumber air baku dan pembuatan IPA agar nantinya

air permukaan tersebut dapat dipersiapkan sebagai air baku PDAM

Saat ini sumber air baku yang dimanfaatkan oleh PDAM di Kabupaten PPU memiliki sumber yang berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi penduduk di setiap kecamatan di Kabupaten PPU, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.7.
Potensi Air Permukaan Kabupaten Penajam Paser Utara

No	Nama Sumber Air Baku	Lokasi		Debit
		Kecamatan	Desa	
1	S. Tengin Baru	Sepaku	Tengin Baru	2 L/dtk
2	S. Mentaya	Sepaku	Semoi 1, Semoi 2 dan Tanah Merah	3 L/dtk
3	Anak S. Mentaya 1	Sepaku	Semoi 2	0,46 L/dtk
4	Anak S. Mentaya 2	Sepaku	Semoi 2	0,37 L/dtk
5	Anak S. Mentaya 3	Sepaku	Semoi 2	0,42 L/dtk
6	S. Mentawir	Sepaku	Mentawir	2 L/dtk
7	S. Suring	Sepaku	Sepaku 1	12 L/dtk
8	D. Logdam	Sepaku	Sepaku 1	-
9	S. Pemaluan	Penajam	Pemaluan	3,5 L/dtk
10	D.Bentayan/S. Bentayan	Penajam	Pemaluan	50 l/dtk
11	D. Pemaluan	Penajam	Pemaluan	-
12	D. Maridan 1	Penajam	Maridan	5 l/dtk
13	D. Maridan 2	Penajam	Maridan	-
14	D. Maridan 3	Penajam	Maridan	-
15	S. Karnen	Penajam	Riko	2,5 L/dtk
16	S. Riko	Penajam	Riko	9 l/dtk
17	D. Sotek /Buatan BPI	Penajam	Sotek	-
18	Bendung Lawe-lawe	Penajam	Lawe-lawe	300 l/dtk
19	Danau Bungur	Waru	Bungur	-
20	Bendung Waru	Waru	Bungur	200 l/dtk
21	Sungai Tunan	Waru		40 l/dtk
22	S. Babulu	Babulu	Babulu Darat	150 l/dtk
23	Rawa Tenong	Babulu	Babulu Darat	15 l/dtk

24	Rawa Telake	Babulu	Babulu Darat	60 l/dtk
25	Bendung	Babulu	Babulu Darat	180 l/dtk
26	Rawa G. Intan	Babulu	Gunung Intan	10 l/dtk
27	MA. Rintik	Babulu	Rintik	0,5 l/dtk
28	Sumur bor	Babulu	Sumbersari	1,5 l/dtk
29	Sumur bor	Babulu	Sriraharjo	1,5 l/dtk
30	Sumur	Babulu	Labangka	1,2 l/dtk

Sumber : RISPAM Kabupaten Penajam Paser Utara 2016

Dari data potensi air baku tersebut maka secara umum volume air baku yang tersedia adalah 1.045,95 l/dtk atau 90.715.680 liter/hari atau cukup untuk memenuhi kebutuhan pengolahan air bagi penduduk sebesar 525 liter/hari/orang.

Masyarakat yang belum terlayani oleh sistem perpipaan PDAM didalam memenuhi kebutuhan air bersih menggunakan sumber lain, yaitu Sumur gali, Sumur pompa, dan Sungai. Pada daerah perencanaan terdapat pula pengelolaan air minum yang dikelola oleh perorangan berupa air kemasan yang memanfaatkan air tanah dalam, diantaranya berada di desa Sepaku, yang diperkirakan kedalaman sumur dalam yang dimanfaatkan \pm 150 m dari permukaan tanah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.8.
Pemanfaatan Air Bersih Lainnya
di Kabupaten Penajam Paser Utara

No	Jenis	Kecamatan	Kelurahan/Desa
1	Sumur gali	Babulu	Desa Labangka
2	Sumur gali	Babulu	Desa Labangka
3	Sumur bor	Babulu	Desa Labangka Barat
4	Embung	Babulu	Desa Labangka Barat
5	Penampung air	Babulu	Desa Babulu Darat
6	WTP	Babulu	Desa Babulu Darat
7	WTP	Babulu	Desa Babulu Darat
8	WTP	Babulu	Desa Babulu Laut
9	Sumur bor	Babulu	Desa Babulu Laut

No	Jenis	Kecamatan	Kelurahan/Desa
10	Sumur bor	Babulu	Desa Babulu Laut
11	WTP	Babulu	Desa Sri Raharja
12	Penampung air	Babulu	Desa Sri Raharja
13	WTP	Babulu	Desa Sri Raharja
14	WTP	Babulu	Desa Gunung Intan
15	Sumber air	Waru	Desa Api-Api
16	Sumur gali	Waru	Desa Api-Api
17	Sumur bor	Waru	Desa Sesulu
18	Penampung air	Waru	Desa Bangun Mulyo
19	Penampung air	Waru	Desa Bangun Mulyo
20	Waduk	Babulu	Desa Gunung Makmur
21	Sumur gali	Babulu	Desa Rintik
22	Sumber air	Babulu	Desa Rintik
23	Sumur bor	Babulu	Desa Gunung Intan
24	Sumur bor	Babulu	Desa Gunung Intan
25	Sumur gali	Penajam	Desa Sidorejo
26	Penampung air	Penajam	Kelurahan Riko
27	Sumur pompa	Penajam	Desa Bukit Subur
28	Sumur pompa	Penajam	Desa Bukit Subur
29	Sumur pompa	Penajam	Desa Bukit Subur
30	Sumur bor	Penajam	Kelurahan Buluminung
31	Sumur bor	Sepaku	Desa Wonosari/Semoi Empat
32	Sumber air	Sepaku	Desa Wonosari/Semoi Empat
33	Sumur gali	Sepaku	Desa Wonosari/Semoi Empat
34	Sumur gali	Sepaku	Desa Argomulyo/Semoi Satu
35	Sumur gali	Sepaku	Desa Argomulyo/Semoi Satu
36	WTP	Sepaku	Desa Argomulyo/Semoi Satu
37	Sumber air	Sepaku	Desa Argomulyo/Semoi Satu
38	Penampung air	Sepaku	Desa Sukomulyo/Semoi Tiga
39	Penampung air	Sepaku	Desa Sukomulyo/Semoi Tiga
40	Sumur bor	Sepaku	Desa Tengin Baru/Sepaku Tiga
41	Sumur gali	Sepaku	Desa Sukaraja/Sepaku Dua
42	Sumur gali	Sepaku	Desa Bumi Harapan/Sepaku Empat
43	Embung	Sepaku	Desa Bumi Harapan/Sepaku Empat
44	Embung	Sepaku	Kelurahan Maridan
45	Sumur bor	Sepaku	Kelurahan Maridan

Sumber : RISPAM Kabupaten Penajam Paser Utara 2016

Selain air permukaan dari sungai, potensi air permukaan lainnya yang dapat dijadikan alternatif sumber air baku

adalah Waduk dan air tanah dalam selain itu peta cekungan air tanah bisa dimanfaatkan untuk mencari potensi air tanah, dimana di dalam cekungan air tanah ini untuk memetakan akuifer air tanah berdasarkan nilai tahanan jenis batuan dari hasil pemetaan geologi.

Seperti halnya potensi air dari sungai, potensi air dari waduk yang paling banyak namun rusaknya DAS belakangan ini antara lain karena perambahan hutan, aktifitas penambangan dan alih fungsi hutan menjadi daerah permukiman dan perkebunan sehingga mengakibatkan distribusi aliran sungai menjadi timpang. Pada musim hujan aliran sungai sangat berlimpah bahkan banjir, sedangkan pada musim kemarau terjadi kekurangan air / kekeringan.

Bila kondisi demikian berlanjut maka pilihan terbaik untuk pemenuhan air baku adalah dengan membangun waduk-waduk untuk menampung air permukaan yang berlimpah pada saat musim hujan yang kemudian dapat digunakan pada saat musim kemarau. Adanya pembangunan wilayah yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan dan karena pertambahan penduduk dan kebutuhannya yang semakin pesat, mengakibatkan kualitas air permukaan baik di sungai maupun di situ-situ juga menurun.

Dengan mencermati hasil yang diperoleh dari survey lapangan dan dukungan data dapat dipergunakan untuk sistem penyediaan air bersih Kabupaten Penajam, untuk lebih detail untuk alternatif sumber air baku di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini dimana yang mempunyai debit besar untuk pengembangannya :

Tabel 2.9.
Alternatif Sumber Air Baku

KECAMATAN	ALTERNATIF SUMBER AIR BAKU
1. PENAJAM	1. Bendungan S. Lawe lawe (300 ltr/dtk)
	2. Mata Air Petung / Girmukti (3 ltr/dtk)
	3. Air Tanah Dalam (3- 5 ltr/dtk) untuk setiap sumur bor)
2. WARU	1. Mata air Waru (3 ltr/dtk)
	2. Air Tanah Dalam (3- 5 ltr/dtk) untuk setiap sumur bor)
	3. Bendung Waru (200 ltr/det), Bendung Tunan
3. BABULU	1. Air Tanah Dalam (3- 5 ltr/dtk) untuk setiap sumur bor)
	2. Sungai Babulu (150 ltr/det)
	3. Bendung Babulu (180 ltr/det)
4. SEPAKU	1. Sungai Tengin Baru (2 m ³ /dtk)
	2. Sungai Mentaya
	3. Air Tanah Dalam
	4. Sungai Riko (9 m ³ /det)
	5. Rencana Waduk Sepaku (3000 m ³)

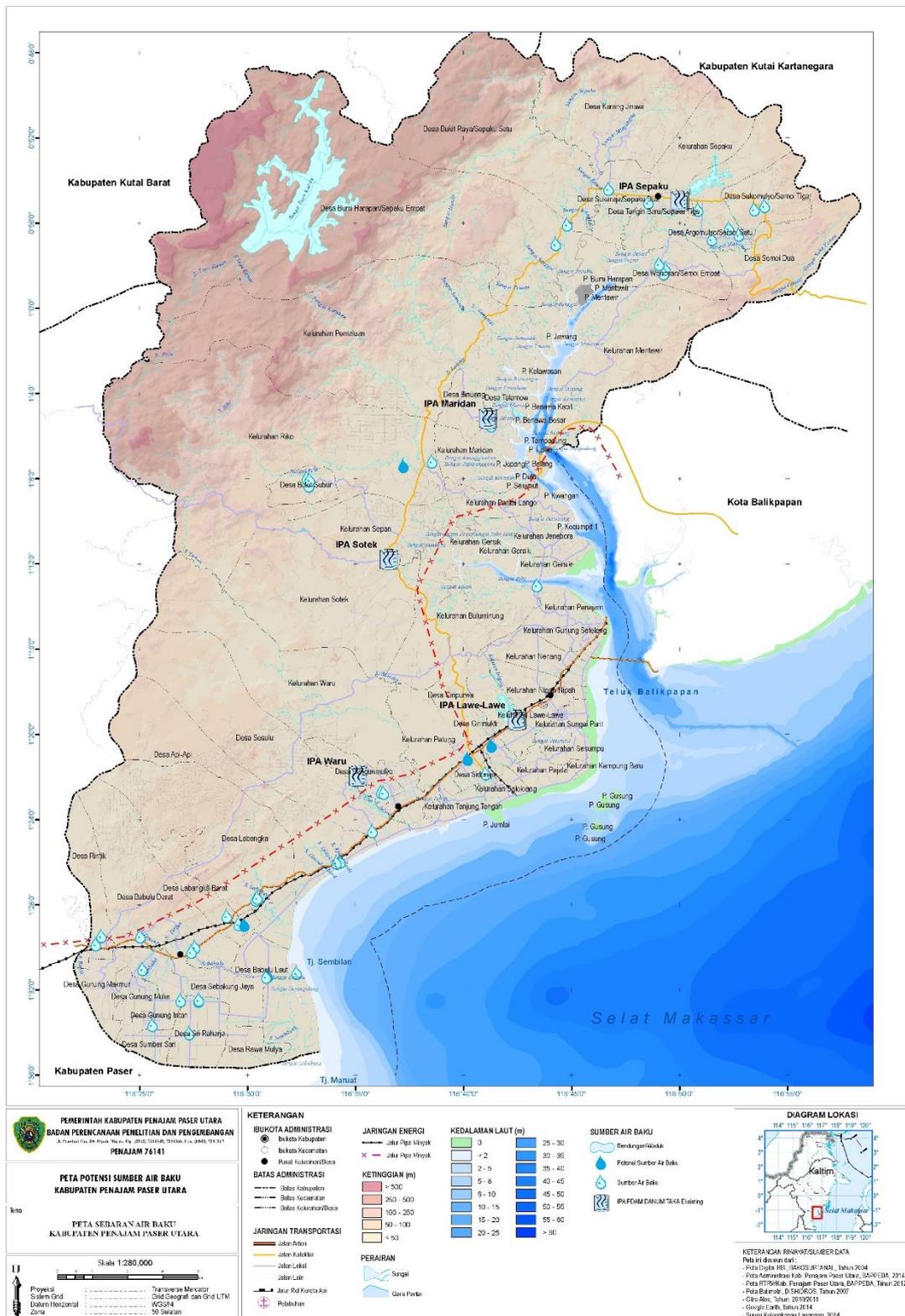
Sumber : RISPAM Kabupaten Penajam Paser Utara 2016

Tabel 2.10.
Potensi Air Baku (Waduk)
Di Kabupaten Penajam Paser Utara

No	Kecamatan	Nama	Luas Waduk (Ha)
1	Waru	Bendung Waru	192,90
2	Babulu	Waduk Babulu Darat	27,94
3	Penajam	Bendung Lawe-Lawe	233,21
4	Penajam	Dam Korindo	8,01
5	Sepaku	Waduk PT. ITCI	11,83
6	Sepaku	Waduk PT. ITCI	76,44
7	Sepaku	Waduk PT. ITCI	14,93
8	Sepaku	Waduk Terunen	10,13

Sumber : RISPAM Kabupaten Penajam Paser Utara 2016

Gambar 2.5
Peta Sebaran Sumber Air Baku Kabupaten Penajam Paser Utara



Sumber : RISPAM Kabupaten Penajam Paser Utara 2016 dan Profil SPAM 2019

Saat ini cakupan pelayanan PDAM Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2019 sebesar 47.634 jiwa dari total jumlah penduduk.

Tabel 2.11.
Data Pelanggan PDAM Kabupaten Penajam Paser Utara

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jumlah Pelanggan (SR)		Jumlah Pelanggan (Jiwa)	
			Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan
1	Penajam	Petung	400		2.400	
		Lawe - Lawe		346		2.076
		Sungai Paret		372		2.232
		Nipah - Nipah		473		2.838
		Nenang	1.047		6.282	
		Penajam	1.994		11.964	
		Gunung Seteleng		716		4.296
		Sotek	470		2.820	
		Giri Mukti	194		1.164	
		Sidorejo		531		3.186
		Jumlah Penajam	4.105	2.438	24.630	14.628
2	Waru	Waru		300		1.800
		Sesulu		150		900
		Bangun Mulyo		287		1.722
		Jumlah Waru	-	737		4.422
3	Sepaku	Tengin Baru	610		3.660	
		Sukaraja		49		294
		Jumlah Sepaku	610	49	3.660	294
		Jumlah Total	4.715	3.224	28.290	19.344

Untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah daerah PPU telah berupaya untuk membuat pengelolaan air minum yang tidak terpusat tetapi instalasi pengolahan dibangun berdasarkan kebutuhan dan cakupan pelayan sesuai dengan kondisi wilayahnya selain kecukupan untuk kebutuhan debit untuk sumber airnya. Beberapa lokasi instalasi pengolahan air minum perkotaan yang telah dibangun meliputi : (1) Instalasi pengolahan air minum di Bendung Waru, (2) Instalasi pengolahan air minum di Sepaku, (3) Instalasi pengolahan air di Rawa Mulya di Babulu Laut.

Jaringan Distribusi oleh perpipaan untuk wilayah pelayanan PDAM Penajam, yaitu meliputi :

1. Kelurahan Lawe-Lawe
2. Kelurahan Nenang
3. Kelurahan Nipah-Nipah
4. Kelurahan Petung
5. Kelurahan Penajam
6. Kelurahan Gunung Seteleng
7. Kelurahan Sotek
8. Desa Girimukti
9. Desa Sidorejo

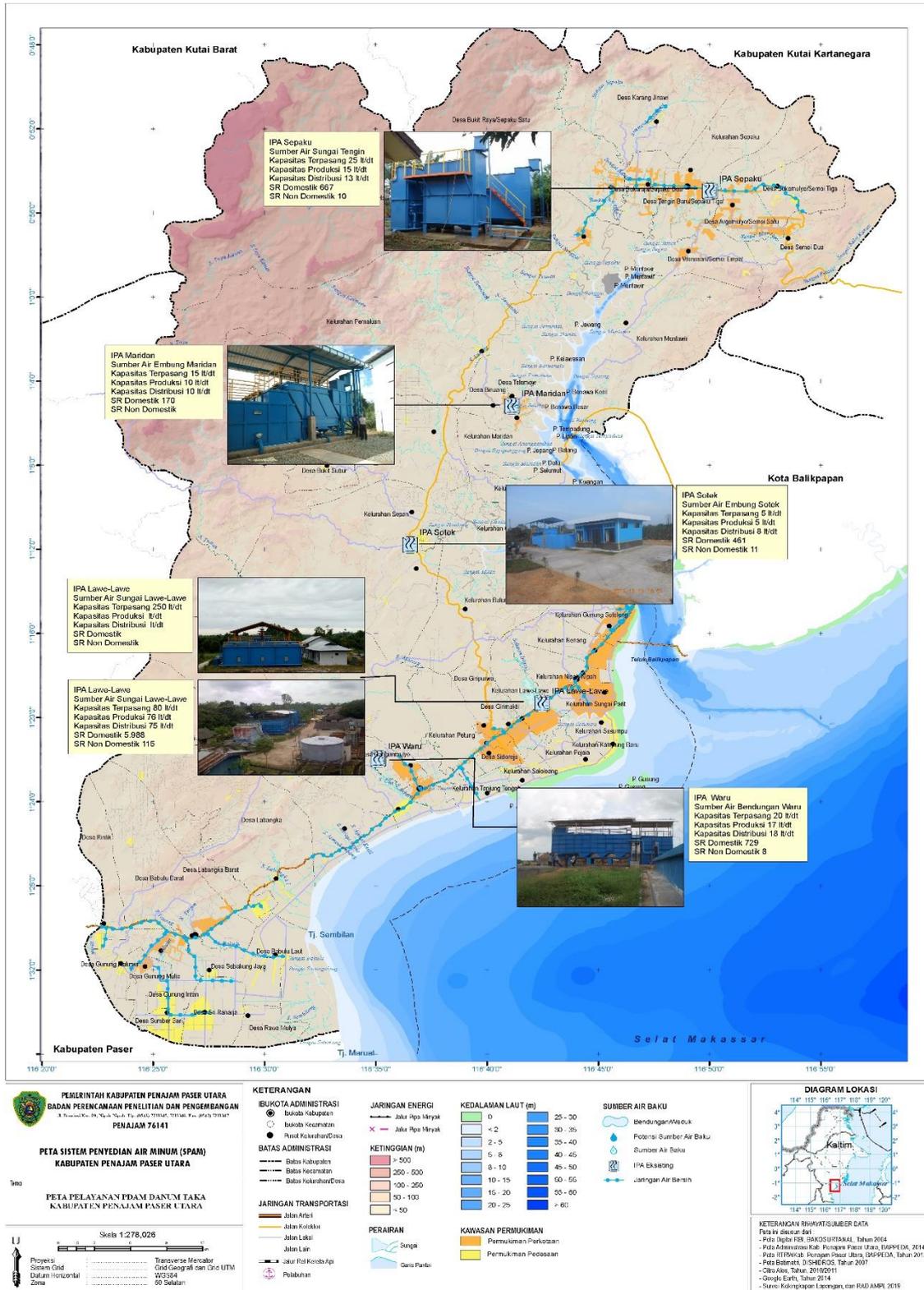
Adapun Jaringan Distribusi oleh perpipaan untuk wilayah pelayanan PDAM Waru meliputi :

1. Kelurahan Waru
2. Desa Sesulu
3. Desa Bangun Mulyo

Dan untuk jaringan distribusi PDAM wilayah pelayanan Sepaku meliputi :

1. Desa Tengin Baru
2. Desa Sukaraja

Gambar 2.6
Cakupan Pelayanan Air Bersih Perpipaan Menurut Wilayah Pelayanan



(sumber : Laporan PDAM Danum Taka 2019)

Penyediaan pelayanan SPAM pedesaan bukan jaringan perpipaan di wilayah desa Kabupaten Penajam Paser Utara sampai saat ini masih tergolong rendah. Sistem penyediaan air minum non-perpipaan (BJP) umumnya berupa air sumur yang berasal dari air tanah yang digali atau dipompa sendiri oleh masyarakat. Air sumur yang digunakan masyarakat sebagai sumber air minum dibedakan menjadi dua, yaitu: sumur terlindung dan sumur tak terlindung/mata air. Rata-rata Masyarakat Kabupaten PPU yang berada di luar area cakupan pelayanan PDAM, yang berpotensi tidak mendapatkan akses air bersih memanfaatkan sumur baik sumur bor (WTP), sumur gali dan sumur tak terlindung/mata air sebagai sarana kebutuhan akan air bersih.

Untuk peningkatan kualitas dan pemenuhan untuk air minum maka dibangun WTP. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah membangun 5 WTP di Kecamatan Babulu yang terbangun mulai tahun 2007 sampai 2014. Selain itu terdapat WTP yang dibangun oleh BPPT di Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Penajam.

Pada tahun 2019 Kabupaten Penajam Paser Utara mendapatkan bantuan penyediaan air minum berbasis masyarakat (PAMSIMAS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan 10 Desa sasaran penerima yaitu :

1. Desa Rawa Mulia di Kecamatan Babulu
2. Desa Sebakung Jaya di Kecamatan Babulu
3. Desa Rintik di Kecamatan Babulu
4. Desa Labangka di Kecamatan Babulu
5. Desa Sesulu di Kecamatan Waru
6. Desa Wonosari di Kecamatan Sepaku
7. Desa Semoi Dua di Kecamatan Sepaku
8. Desa Argo Mulyo di Kecamatan Sepaku
9. Desa Sukomulyo di Kecamatan Sepaku
10. Desa Karang Jinawi di Kecamatan Sepaku

Program PAMSIMAS yang baru berjalan tahun 2019 ini di Kabupaten Penajam Paser Utara diharapkan akan dapat meningkatkan cakupan akses air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat kepada warga penerima manfaat di 10 Desa dan sekitar 22.208 jiwa.

Potensi dan kapasitas sumber air baku yang belum dimanfaatkan dapat memenuhi kebutuhan air minum masyarakat yang belum memiliki akses keberlanjutan terhadap sumber air minum. Adapun potensi dan kapasitas sumber air baku Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai berikut

Tabel 2.12.
Potensi dan kapasitas sumber air baku
di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018

No	Kecamatan	PDAM (liter/det)	Mata Air (liter/det)	Air permukaan (liter/det)	Air Tanah (liter/det)	Lain-Lain (liter/det)	Jumlah debit (liter/det)
1	Sepaku	15.00	0	20.25	0	0	0
2	Penajam	83.75	0	370	0	0	0
3	Waru	17.88	0	240	0	0	0
4	Babulu	0	0.5	415	4.2	0	0
	Total	116.63	0.5	1.045.25	4.2	0	0

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017

Tabel 2.13.
Jumlah Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum
dan Sumber Air Bersih Lainnya
Tahun 2018

No	Kecamatan	PDAM	Mata Air	Sumur Gali	Sumur Pompa	Sumur Bor	Embung	Penampung Air Hujan	Hidran Umum	WTP
		SR)*	Unit)	(Unit)	(Unit)	(Unit)	(Unit)	(Unit)	(Unit)	(Unit)
1	Penajam	6.543	168	2.297	272	3	-	528	-	-
2	Waru	737	26	335	749	1	5	770	1	-
3	Babulu	-	67	2.024	851	7	1	816	2	6
4	Sepaku	659	1	320	7	5	3	728	-	1
	Jumlah	7.939	262	4.976	1.879	16	9	2.842	3	7

*Sumber : *Laporan Bulanan PDAM Danum Taka, Mei 2019
 Data Profil Desa 2018, BPMPD Kabupaten PPU dan RISPAM, data diolah*

Tabel 2.14.
Cakupan Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara dengan
Akses Air Minum Aman Tahun 2018

Sistem	Perkotaan			Perdesaan			Kabupaten		
	Jumlah Penduduk Terlayani (Jiwa)	Jumlah Penduduk Perkotaan (Jiwa)	(%) Terhadap Jumlah Penduduk Perkotaan (Jiwa)	Jumlah Penduduk Terlayani (Jiwa)	Jumlah Penduduk Perdesaan (Jiwa)	(%) Terhadap Jumlah Penduduk Perdesaan (Jiwa)	Jumlah Penduduk Terlayani (Jiwa)	Jumlah Penduduk Kabupaten (Jiwa)	(%) Terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten (Jiwa)
Jaringan Perpipaan									
- PDAM*	28.290	59.372	47,65%	19.344	113.495	17,04%	47.634	172.867	27,56%
- Berbasis Masyarakat	-	59.372	-	-	113.495	-	-	172.867	-
Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi	2.576	59.372	4,34%	39.829	113.495	35,09%	42.405	172.867	24,53%

*Sumber : *PDAM Danum Taka, Mei 2019
 Data Profil Desa 2018, BPMPD Kabupaten PPU dan RISPAM, data diolah*

Tabel 2.15.
Tingkat Pelayanan PDAM Tahun 2018
Kabupaten Penajam Paser Utara

No	STATUS PDAM	JUMLAH PENDUDUK 2016 (JIWA)			CAKUPAN PELAYANAN (JIWA)			KAPASITAS PERKOTAAN (LITER / DETIK)			INDIKASI TK. KEBOCORAN (%)
		PERKOTAAN	PERDESAAN	TOTAL	PERKOTAAN	PERDESAAN	TOTAL	TERPASANG	PRODUKSI	INDIKASI KAP.IDLE	
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7	8 = 6 + 7	9	10	11	12
1	SEHAT	59.372	113.495	172.867	28.290	19.344	47.634	130	40,26	3,37	38,23

Sumber: PDAM Danum Taka Kabupaten Penajam Paser Utara , Mei 2019

Berdasarkan penjabaran dan tabel-tabel diatas maka status capaian kinerja pelayanan air minum Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2018 dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 52,09% penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara yang telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum aman.
- 51,99% penduduk telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum aman di perkotaan;
- 52,13% penduduk telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum aman di perdesaan.

2.2.2. Sanitasi

Sanitasi adalah upaya untuk menjamin dan meningkatkan penyehatan lingkungan dalam suatu kawasan permukiman, termasuk pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan air limbah, air hujan/drainase, dan sampah. Sasaran penyediaan sanitasi adalah meningkatnya kualitas layanan sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) permukiman.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyatakan bahwa indikator SPM bidang sanitasi sebagai berikut :

a. Pengelolaan Air Limbah Permukiman

Sasaran penyediaan sanitasi air limbah permukiman adalah meningkatnya kualitas layanan sistem air limbah permukiman dengan indikator sebagai berikut :

- Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah setempat yang memadai
- Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah terpusat.

Target capaian SPM pengelolaan air limbah permukiman yang memadai adalah jumlah penduduk yang terlayani sistem pengelolaan air limbah pada tahun 2019 sebesar 60%. SPM pengelolaan air limbah permukiman yang memadai adalah persentase jumlah penduduk yang terlayani dengan tangki septik/MCK Komunal/sistem pengolahan Air Limbah-SPAL Terpusat) terhadap jumlah total penduduk.

Tabel 2.16.
Jumlah Kepala Keluarga (KK) dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi yang Layak (Jamban Sehat) Tahun 2018

NO	KECAMATAN	JSP (KK)	JSSP (KK)	SHARING (KK)	BABS (KK)	% Akses Jamban
1	Penajam	10.953	4666	2235	1576	89.58
2	Waru	3.816	989	0	177	95.24
3	Babulu	4.388	1533	2075	1127	91.81
4	Sepaku	6.877	2593	909	550	94.44
	Jumlah	26.034	9.781	5.219	3.430	91.84

Sumber : Smart STBM Kemenkes

Tabel 2.17.
Cakupan Pengelolaan Air Limbah Permukiman

No.	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)
	Wilayah Perkotaan	
A	Tanpa Akses	
1	Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	4.28%
2	Cubluk/ Tangki septik individual- tidak layak	7.17%
B	Akses Layak	
B.I	SPALD Setempat	
1	Skala Individual	21.08%
2	Skala Komunal	2.11%
B.II	SPALD Terpusat	
1	SPALD-T Permukiman	
	a. Berbasis Masyarakat	0.00%
	b. Berbasis Institusi	0.00%
2	SPALD-T Perkotaan	0.00%
3	SPALD-T Kawasan Tertentu	0.00%
	Wilayah Perdesaan	
A	Tanpa Akses	
1	Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	12.13%
B	Akses Dasar	
1	Cubluk / Tangki Septik individual tidak layak	14.64%
C	Akses Layak	
C.I	SPALD Setempat	
1	Skala Individual	30.00%
2	Skala Komunal	8.61%
C.II	SPALD Terpusat	
1	SPALD-T Permukiman	
	a. Berbasis Masyarakat	0.00%
	b. Berbasis Institusi	0.00%
2	SPALD-T Perkotaan	0.00%
3	SPALD-T Kawasan Tertentu	0.00%
	T O T A L	100.00%

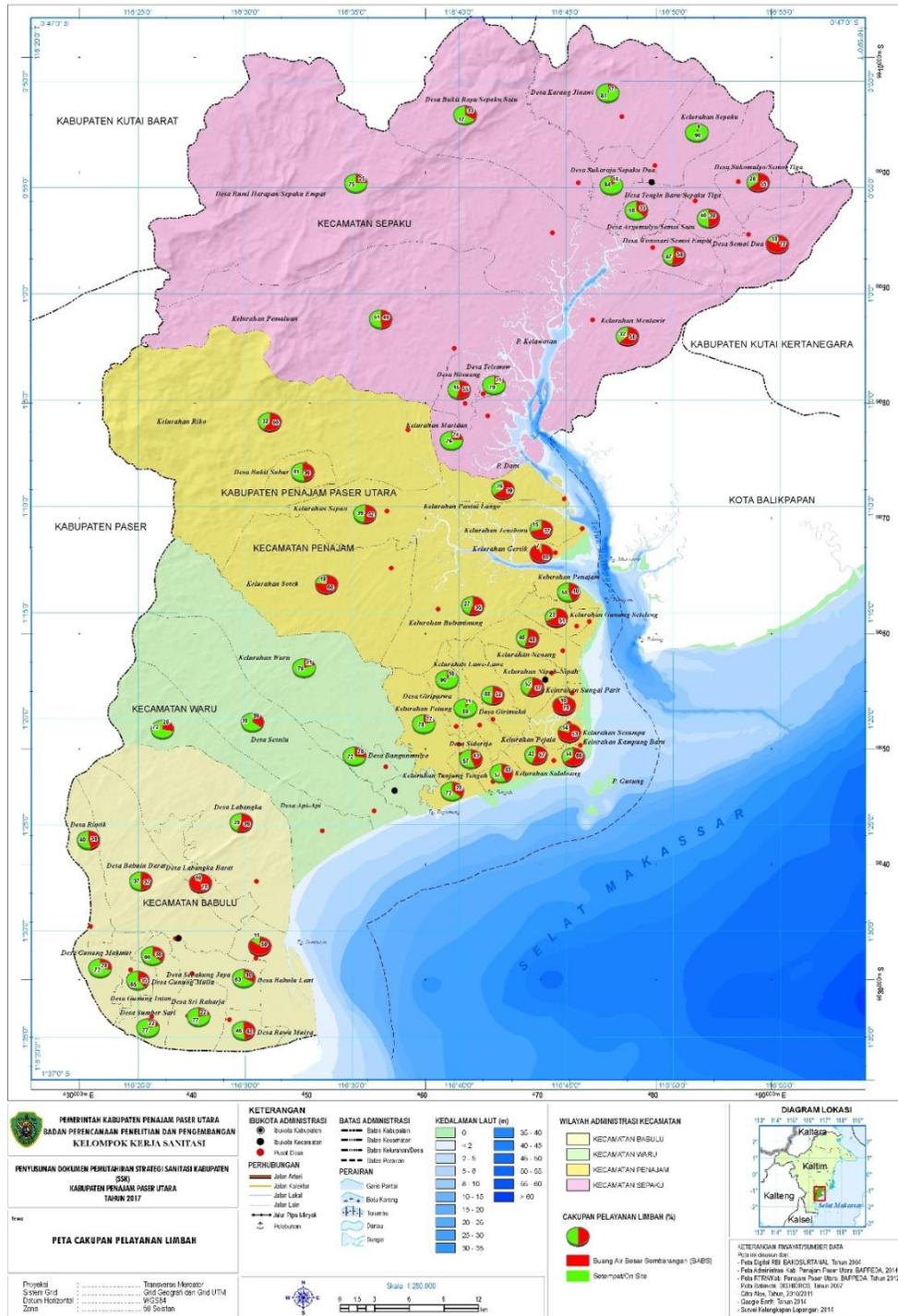
Sumber : SSK Kabupaten Penajam Paser Utara 2017

Status capaian kinerja pelayanan sanitasi sub sektor air limbah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2018 adalah sebagai berikut

:

- 91,84 % penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak (jamban sehat)
- Terdapat 3.430 KK (6,24 %) penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara yang masih melakukan BABS

Gambar 2.7.
Peta Cakupan Pelayanan Air Limbah Kabupaten Penajam Paser Utara



Sumber : SSK Kabupaten Penajam Paser Utara 2017

b. Pengelolaan Sampah

Berdasarkan Peraturan Presiden No 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Target pengurangan dan penanganan Sampah sebagai berikut :

- 1) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah
- 2) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah.

Untuk cakupan layanan persampahan Kabupaten Penajam Paser Utara disajikan pada Tabel seperti yang tersaji di bawah ini :

Tabel 2.18.
Cakupan Layanan Persampahan Eksisting
Kabupaten Penajam Paser Utara

No.	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)
	Wilayah Perkotaan	
A	Tanpa Akses	
1	Sampah Tidak Terproses	0.47%
2	Sampah Dikelola Mandiri oleh Masyarakat	0.00%
B	Akses Layak	
1	Sampah Terangkut ke TPA (langsung dan tidak langsung)	34,16%
2	Sampah Tereduksi di TPS3R/TPST/Bank Sampah	0.00%
	Wilayah Perdesaan	
A	Tanpa Akses	

1	Sampah Tidak Terproses	26,23%
B	Akses Dasar	
1	Sampah Dikelola Mandiri oleh Masyarakat	0.00%
C	Akses Layak	
1	Sampah Terangkut ke TPA (langsung dan tidak langsung)	39,13%
2	Sampah Tereduksi di TPS3R/TPST/Bank Sampah	0.00%
	T O T A L	100.00%

Sumber : SSK Kabupaten Penajam Paser Utara 2017

Dari table di atas dapat diketahui bahwa untuk wilayah perkotaan eksisting sampah tidak terproses 0.47%, sampah terangkut baru 34,16% dan yang tereduksi terlebih dulu di bank sampah atau 3R 0.00%.

Untuk wilayah perdesaan cakupan eksistingnya sampah tidak terproses sebesar 26,23%, sampah yang dikelola masyarakat 0,00%, sedangkan yang terangkut ke TPA 39,13%.

Persampahan memang masih menjadi permasalahan utama yang berkaitan dengan lingkungan hidup di Kabupaten Penajam Paser Utara. Pada tahun 2017, sampah yang terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Buluminung hanya sekitar 25,52% atau sebanyak 46.546 m³. Memperhatikan dari sisi sebaran penduduk, kapasitas tampungan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dapat dilihat dari rasio kapasitas TPS terhadap timbulan. Data dimaksud per kecamatan disajikan pada Tabel 2.41.

Tabel 2.19.
Rasio Penduduk per TPS Menurut Kecamatan Tahun 2017
Kabupaten Penajam Paser Utara

No	Kecamatan	Penduduk	Timbulan sampah (m3/hari)	TPS		Rasio Kapasitas TPS terhadap Timbulan Sampah
				Jumlah	Kapasitas (m3/hari)	
1	Penajam	79,294	238	161	512.5	2.15
2	Waru	18,471	55	8	43	0.78
3	Babulu	33,799	101	14	67	0.66
4	Sepaku	34,990	105	57	357	3.40

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup 2018

Rasio kapasitas TPS terhadap timbulan di Kecamatan Penajam dan Kecamatan Sepaku masing-masing sebesar 2,15 dan 3,4 hal ini menggambarkan ketersediaan TPS pada kedua kecamatan tersebut sangat mencukupi untuk menampung sampah per hari.

Sedangkan pada kecamatan Waru dan Kecamatan Babulu, untuk rasio yang sama angkanya kurang dari 1,00 yang berarti kapasitas TPS masih belum memadai.

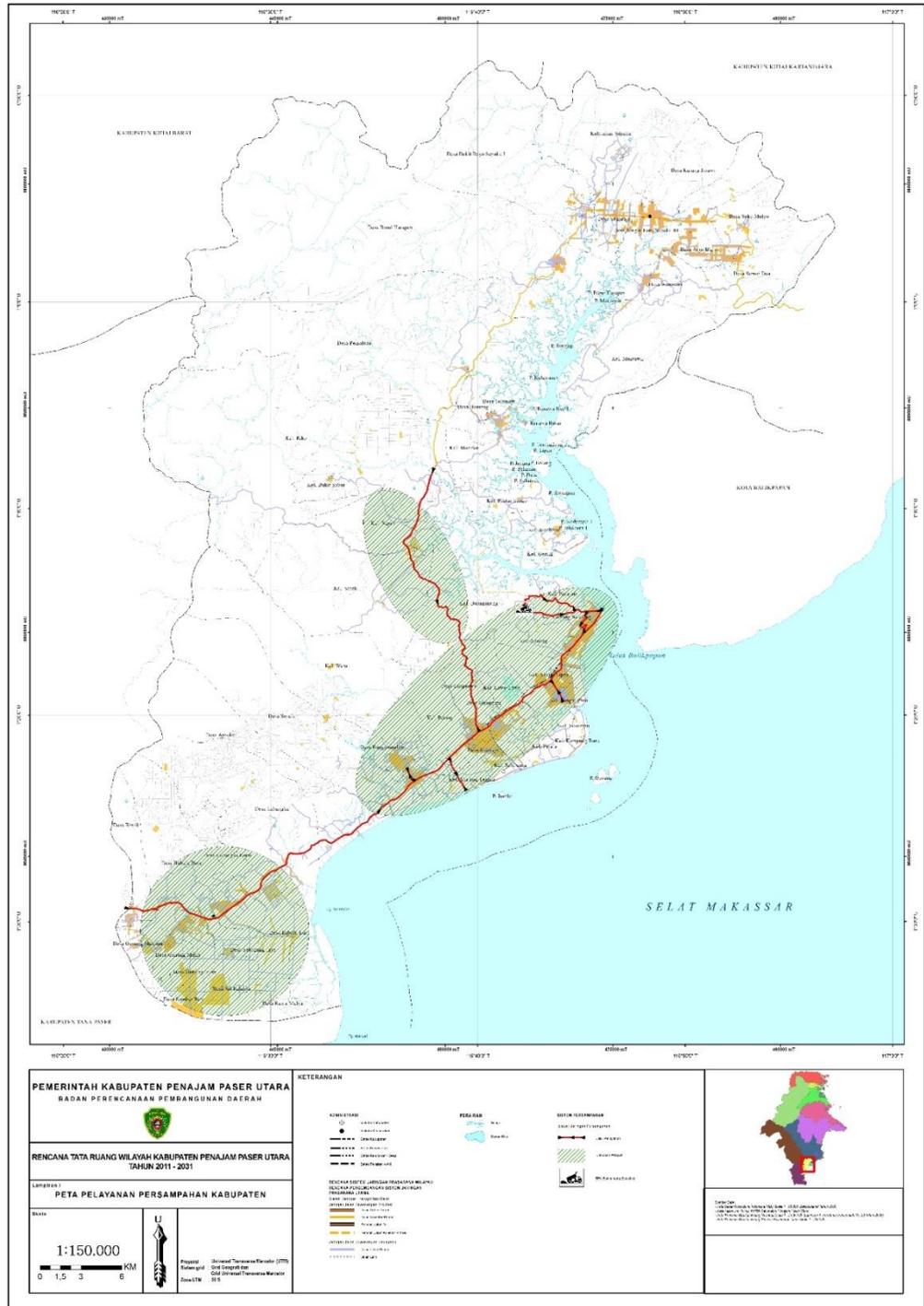
Kendala terkait persampahan antara lain terbatasnya truk sampah/armada angkut dan biaya operasional serta cakupan wilayah pelayanan yang terlalu luas/jauh. Disamping itu kesadaran masyarakat untuk memilah dan mereduksi sampah masih rendah serta belum adanya upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan (pemberlakuan daur ulang sampah, dll).

Selain persampahan, pembahasan lingkungan hidup juga tidak terlepas dari penerapan amdal. Terdapat 59 kegiatan usaha yang telah memiliki izin lingkungan, dimana 39 kegiatan usaha memiliki dokumen UKL-UPL, 15 kegiatan dengan dokumen amdal dan 8 dokumen DPLH/DELH.

Status capaian kinerja pelayanan sanitasi sub sektor persampahan Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- 34,16 % Jumlah penduduk perkotaan yang telah memiliki akses dalam pengelolaan sampah
- 39,13% Jumlah penduduk pedesaan yang telah memiliki akses dalam pengelolaan sampah

Gambar 2.8.
Peta Cakupan Pelayanan Persampahan Kabupaten Penajam Paser Utara



Sumber : SSK Kabupaten Penajam Paser Utara 2017

c. *Sub Sektor Drainase*

Sasaran penyediaan sistem drainase adalah meningkatnya kualitas layanan drainase kawasan perkotaan dengan Indikator penyediaan sistem drainase sebagai berikut :

- 1) Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota.
- 2) Persentase genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) yang tertangani.

Berikut adalah daerah atau titik-titik genangan yang terjadi di kabupaten Penajam Paser Utara. Wilayah rawan genangan disini adalah wilayah Kelurahan/Desa dengan skor risiko sanitasi sektor drainase tinggi (3) dan sangat tinggi (4)

Tabel 2.20.
Luas Wilayah Rawan Genangan
di Kabupaten Penajam Paser Utara

No	Titik Genangan di Area Permukiman	Luas genangan eksisting di Area Permukiman (ha)
1	BTN KM. 1,5 Penajam	5.00
2	BTN KM. 4 Penajam	3.10
3	Perum Korpri Kel. Sungai Parit	6.10
4	Perum Gusung Kel. Penajam	4.00
5	Kel. Sungai Parit RT. 1,5 dan 6	9.00
6	Kel. Petung RT. 4,5,6,14,15	6.10
7	Pasar Lama Penajam	2.00
8	Gg. Qomar RT.7 Penajam	0.50
9	Gg. Buaya RT.6 Penajam	0.50
10	RT 1 KM 2 Gn. Seteleng	5.60
11	RT 2 KM 2 Gn. Seteleng	3.60
12	Gg. Rana Gn. Seteleng	5.90
13	Pasar Waru Kec. Waru	2.00

No	Titik Genangan di Area Permukiman	Luas genangan eksisting di Area Permukiman (ha)
14	Kel. Babulu Darat Kec. Babulu	2.00
15	Kel. Tengin Baru Kec. Sepaku	1.00
16	Kel. Maridan Kec. Sepaku	1.00
17	Kel. Sukaraja Kec. Sepaku	1.00
	T o t a l	58.40

Target capaian SPM sistem jaringan drainase adalah persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam, lebih dari 2 kali setahun) sebesar 50% pada tahun 2019.

Status capaian kinerja pelayanan jaringan drainase Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- Terdapat 306,023.60 Ha Luas Wilayah daratan telah bebas genangan
- Masih terdapat 58.40 Ha genangan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten

2.3 Permasalahan dan Tantangan

2.3.1 Permasalahan

a. Permasalahan Terkait Air Minum

Secara garis besar untuk pemenuhan kebutuhan air minum dalam mencapai *Akses Universal* di Kabupaten Penajam Paser Utara terdapat beberapa aspek permasalahan yang dihadapi yaitu antara lain :

1) **Aspek Teknis**

Permasalahan yang dihadapi adalah:

- Secara alamiah yakni rendahnya kualitas air baku yang tersedia
- Beberapa daerah tidak memiliki sumber air baku yang layak
- Mahalnya Biaya Teknologi Pengolahan untuk mengolah air baku yang tersedia
- Tingkat kebocoran jaringan pipa PDAM yang cukup tinggi
- Terbatasnya sumber pasokan air baku yang andal
- Tingginya biaya listrik baik PLN maupun Genset
- Kebanyakan sumber air yang ada mengandung pyrit/ asam
- Kapasitas IPA yang kurang sebanding dengan kebutuhan masyarakat
- Kurangnya sumber daya manusia di sektor yang menangani Penyediaan Air Minum

2) **Aspek Geografis**

Permasalahan yang dihadapi adalah:

- Beberapa wilayah memiliki lokasi sumber air baku yang jauh dari daerah layanan (pemukiman)
- Sebaran penduduk yang tidak merata sehingga biaya investasi yang dibutuhkan menjadi tinggi
- Topografi wilayah Penajam Paser Utara sebagian merupakan daerah perbukitan sehingga mengakibatkan biaya operasional tinggi

- Banyak lokasi sumber air baku berada di bawah sehingga dalam penanganannya harus dengan sistem pompa
- Masih banyak masyarakat yang belum memiliki akses terhadap air minum/air bersih karena letak daerah yang sulit dijangkau

3) Aspek Pendanaan

Permasalahan yang dihadapi adalah:

- Keterbatasan anggaran pemerintah daerah dalam pemenuhan dan penyediaan sarana air minum
- Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana air minum belum menjadi skala prioritas di desa
- Peran pendanaan selain APBD Kabupaten belum dioptimalkan
- Belum optimalnya Pemerintah Daerah dalam kolaborasi anggaran dan masih rendahnya komitmen program air minum
- Masih rendahnya peran swasta/ Corporate Social Responsibility (CSR) untuk kegiatan air minum
- Belum tergalinya potensi pendanaan dari masyarakat

4) Aspek Kelembagaan dan Perundang-undangan

Permasalahan yang dihadapi adalah :

- Masih rendahnya koordinasi antar instansi/OPD terkait penanganan permasalahan air minum dan penetapan kebijakan pengelolaan air minum
- Belum memadainya perangkat peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan air minum

- Belum adanya kebijakan komprehensif lintas sektor dalam penyediaan air minum
- Masih rendah dan terbatasnya SDM dalam pengelolaan air minum
- Rendahnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan
- Belum adanya peran BPSPAMS dan Asosiasi SPAMS Perdesaan
- Pelayanan air minum oleh PDAM belum menjangkau ke seluruh masyarakat
- Belum memadainya perangkat Peraturan perundangan (Perda/Perbup, dll) yang diperlukan dalam pengelolaan (Dinas Perumahan)
- Belum semuanya daerah memiliki lembaga pengelola sarana air minum (kelompok pengguna air minum)

5) Aspek Sosial dan Dunia Usaha

Permasalahan yang dihadapi adalah:

- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan pengoperasionalan sarana air minum
- Lemahnya koordinasi dalam mengakses sumber pendanaan dari pihak swasta
- Masih kurangnya perhatian pihak swasta terhadap kegiatan air minum di masyarakat
- Belum optimalnya fasilitasi pemerintah daerah untuk melibatkan dunia usaha dalam pendanaan pembangunan air minum
- Rendahnya koordinasi antar instansi terkait dalam menggerakkan peran masyarakat

- Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan system yang berbasis masyarakat
- Belum optimalnya pelaksanaan Sosialisasi, Advokasi dan Edukasi pemerintah kepada masyarakat terkait pengelolaan air minum

6) Aspek Lingkungan

Permasalahan yang dihadapi adalah:

- Potensi pencemaran sumber air baku karena aktivitas pertambangan dan perkebunan
- Tingginya kadar asam pada air baku terutama untuk sumur gali dan sumur bor
- Degradasi lingkungan akibat luasnya perkebunan kelapa sawit dan pertambangan
- Terjadinya perubahan rona awal lingkungan akibat adanya alih fungsi lahan sehingga daerah tangkapan dan resapan air terganggu
- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melindungi daerah tangkapan dan resapan air.
- Tingginya pemanfaatan sumur bor yang dapat membahayakan lingkungan

b. Permasalahan Terkait Sanitasi

1. Komponen Air Limbah

Permasalahan terkait dengan faktor internal :

Aspek Kelembagaan

- Belum ada SKPD yang menangani khusus air limbah

- Kelembagaan untuk mengatur sistem tangki septik belum ada
- Peraturan yang menyangkut kelembagaan atau badan pengelola belum ada
- Peraturan / regulasi menyangkut tentang pengelolaan air limbah belum ada
- Peraturan / regulasi tentang kewajiban ikut menangani masalah air limbah belum ada
- Belum ada kelembagaan (UPTD) yang khusus menangani pengelolaan IPLT

Aspek Keuangan

- Minimnya alokasi anggaran untuk pengelolaan air limbah pada instansi terkait
- Belum optimalnya penggalan potensi pendanaan berupa swadaya masyarakat dan partisipasi dunia usaha/swasta.
- Minimnya alokasi anggaran untuk pengelolaan air limbah di tingkat desa

Aspek Teknis Operasional

- Pelayanan truk sedot tinja masih belum melayani masyarakat
- Belum ada Perencanaan untuk Pengelolaan air limbah (Rencana Induk/ masterplan)
- Jumlah Truk tinja masih kurang
- Tidak ada saluran air limbah untuk melayani pembuangan air limbah rumah tangga (Skala kawasan/ komunal)

- Belum adanya IPAL untuk melayani pembuangan air limbah rumah tangga
- Masih terbatasnya Program/Kegiatan Pengelolaan air limbah yang berbasis masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemda.
- Kurangnya layanan penyedotan limbah tinja dan belum tersedianya instalasi pengolahan limbah tinja yang memadai.
- Sebagian besar fasilitas pengolahan air limbah setempat masih belum memenuhi standar teknis kesehatan.

Aspek Komunikasi

- Belum optimalnya kegiatan sosialisasi dan kampanye tentang air limbah rumah tangga
- penyuluhan untuk menjelaskan masalah air limbah belum optimal
- Belum memanfaatkan media massa sebagai sarana untuk promosi dan penerangan masalah air limbah

Aspek SDM

- SDM pengelola air limbah masih minim
- Tidak adanya pegawai yang menangani masalah air limbah
- Kemampuan personil terkait pengelolaan air limbah belum maksimal.

Aspek Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta

- Belum adanya keterlibatan dan peran pihak Swasta dalam penanganan air limbah

- Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pengelolaan limbah rumah tangga yang sesuai standar kesehatan
- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan khususnya limbah rumah tangga
- Belum adanya penyelenggaraan pengembangan sistem air limbah domestik berbasis masyarakat

Permasalahan terkait dengan faktor eksternal:

Aspek Kelembagaan

- Terjadinya perubahan aturan kelembagaan dari Pemerintah Daerah dan Pusat
- Mutasi pegawai dan pejabat yang mengelola air limbah

Aspek Keuangan

- Kondisi keuangan daerah tiap tahun makin menurun

Aspek Teknis Operasional

- Limbah greywater dibuang langsung ke tanah/ tempat terbuka. menyebabkan pencemaran lingkungan
- Tangki septik yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat masih kurang/tidak layak
- Tangki septik belum pernah dikuras

Aspek Komunikasi

- Tidak semua masyarakat memperdulikan pesan tentang pentingnya pengelolaan air limbah

Aspek Partisipasi Masyarakat, Swasta, dan Kesetaraan Jender

- Tingkat ekonomi masyarakat yang rendah berpengaruh pada penyediaan sarana (WC)
- Masih adanya sebahagian masyarakat yang buang air besar sembarangan
- Partisipasi Masyarakat masih rendah dan banyak perilaku PHBS

Demografi dan Lingkungan Hidup

- Peningkatan jumlah penduduk yang besar; permasalahan terhadap kebutuhan layanan sarana limbah melebihi kapasitas / kemampuan pemda
- Kecenderungan pertumbuhan permukiman di area pesisir semakin meningkat dan tidak terkendali
- Pertumbuhan bangunan liar mengganggu sistem / menyulitkan pelayanan air limbah

2. Komponen Persampahan

Permasalahan terkait dengan faktor internal :

Aspek Kelembagaan

- UPT yang menangani persampahan belum ada
- Kewajiban dan sanksi bagi pemerintah dalam pengelolaan sampah belum efektif dilaksanakan

Aspek Keuangan

- PAD dari pengelolaan persampahan belum berjalan dengan efektif
- Anggaran untuk sektor persampahan masih rendah

Aspek Teknis Operasional

- Pengembangan bank sampah masih kurang
- cakupan pelayanan persampahan belum merata di semua kecamatan
- Jumlah prasarana dan sarana yang masih kurang dalam meningkatkan cakupan layanan persampahan

Aspek Komunikasi

- Belum optimalnya kegiatan sosialisasi dan kampanye tentang sampah
- Pengenalan pentingnya menjaga kebersihan pada anak usia dini belum maksimal

Aspek SDM

- Pengelolaan TPS 3R belum berbasis masyarakat

Permasalahan terkait dengan faktor eksternal :

Aspek Kelembagaan

- Belum ada pengaturan pengelolaan untuk penanganan sampah yang dikelola masyarakat
- Tidak adanya kelembagaan untuk mengelola sampah oleh masyarakat
- Perda yang mendukung kelembagaan oleh masyarakat tidak ada

Aspek Keuangan

- Dukungan dana dari CSR sangat kurang
- Tidak ada dana dari masyarakat untuk mendukung sarana sampah

Aspek Teknis Operasional

- Sampah tidak dipilah dari sumbernya
- Banyak sampah yang dibuang ke selokan
- Sarana persampahan masih ada yang rusak/kurang layak

Aspek Komunikasi

- Media yang memberitakan tentang artikel pengelolaan sampah masih kurang
- Belum ada penyuluhan yang dilakukan oleh lembaga masyarakat tertentu

Aspek Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat / Swasta

- Perilaku sebagian masyarakat yang membuang sampah ke Pantai/laut, Sungai dan Kebun
- Kurang minatnya masyarakat untuk mendirikan sarana sampah yang layak
- Pengetahuan tentang penanganan sampah di masyarakat masih rendah
- Belum ada kerja sama dengan pihak swasta
- Tingkat ekonomi masyarakat yang rendah berpengaruh pada penyediaan tempat sampah

- Belum ada partisipasi swasta / perusahaan untuk membantu dalam membangun sarana sampah yang layak (CSR)

Demografi dan Lingkungan Hidup

- Peningkatan jumlah penduduk tiap tahun dari luar kabupaten sehingga mempengaruhi volume sampah
- Sektor Sanitasi lebih terpusat pada kota Kecamatan
- Peningkatan jumlah penduduk pendatang yang kurang berkualitas

3. Komponen Drainase

Permasalahan terkait dengan faktor internal :

Aspek Kelembagaan

- Masih tumpang tindihnya pelaksanaan lapangan tiap OPD dan Dinas terkait dalam pembagian pengelolaan saluran drainase
- Masih lemahnya pemahaman pengelola sistem drainase terhadap fungsi drainase dan elemen/faktor lain yang berpengaruh dalam pembangunan drainase.
- Monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan drainase lingkungan skala kawasan pemukiman masih lemah
- Belum adanya aturan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase

Aspek Keuangan

- Mulai menurunnya Alokasi APBD sektor Drainase dikarenakan menurunnya DBH migas Kabupaten

Aspek Teknis Operasional

- Saluran drainase sebagian besar mengalami penyempitan dan gangguan aliran akibat bangunan liar dan sampah
- Saluran drainase mendapat beban pencemaran buangan limbah dan sampah
- Belum terkoordinasi dengan baik pengelolaan drainase lingkungan yang dilakukan oleh pemda dan yang berbasis masyarakat.
- Penanganan sistem drainase masih bersifat parsial tidak dalam skala perwilayahan dan belum dikelola secara terintegrasi dengan instansi terkait.
- Grey water masih bercampur dengan saluran drainase dan belum ada sumur resapan
- Banyak daerah bantaran sungai yang sudah dijadikan tempat tinggal, sehingga dapat memicu terjadi banjir
- Dimensi saluran tidak sesuai dengan peningkatan debit banjir
- Berkurangnya lahan resapan air akibat alih fungsi lahan
- Masterplan Drainase belum dijadikan dasar dalam kegiatan SKPD pengampuh

Aspek Komunikasi

- Belum optimalnya kegiatan sosialisasi dan kampanye tentang sanitasi dan kebersihan lingkungan
- Belum memanfaatkan media massa sebagai sarana untuk promosi dan penerangan masalah sanitasi dan kebersihan lingkungan
- Kegiatan komunikasi yang dilakukan Pemda dalam rangka sosialisasi dan kampanye belum maksimal dan

belum dilaksanakan secara kontinyu, terencana dan terstruktur.

Aspek SDM

- SDM pengelola / pemeliharaan sistem drainase masih rendah

2.3.1 Tantangan

Secara nasional, tantangan utama dalam meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang layak antara lain sebagai berikut:

1) Belum lengkapnya peraturan yang mendukung sanitasi yang layak dan belum optimalnya penerapan aturan terkait air minum.

Sejumlah peraturan yang ada sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada, Di samping itu, peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam bekerja sama dengan masyarakat setempat dalam pelaksanaan pembangunan air minum dan sanitasi perlu lebih diperjelas.

2) Belum adanya kebijakan komprehensif lintas sektor dalam penyediaan air minum dan sanitasi yang layak.

Banyak institusi dan lembaga yang membidangi pembangunan air minum dan sanitasi, sehingga dibutuhkan koordinasi yang lebih intensif, terutama pada tataran pelaksanaan program.

3) Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air minum.

Masih banyaknya rumah tangga yang menggunakan sumber air minum non-perpipaan menurunkan kuantitas sumber daya air minum, ditambah lagi sistem sanitasi on-site yang ada juga

belum disertai dengan investasi dalam infrastruktur penampungan, pengolahan, dan pembuangan limbah tinja sehingga meningkatkan pencemaran terhadap sumber air baku.

4) Belum diimbangnya pertumbuhan penduduk, terutama di perkotaan dengan pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi yang layak.

Tingkat investasi dalam penyediaan sambungan perpipaan khususnya di perkotaan tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk perkotaan. Begitu pula investasi dalam penyediaan layanan sambungan air limbah terpusat skala kota (sewerage system) dan skala komunal (communal system).

5) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan praktik Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Keadaan dan perilaku kurang sehat tercermin dari masih tingginya kasus diare yang mencapai 3.315 kasus (Data Dinkes Kab.Penajam Paser Utara, 2018). Mencuci tangan dengan sabun belum menjadi budaya dan kebiasaan; masih terdapat 3.430 KK (6,24 %) masih melakukan buang air besar di tempat terbuka; dan meskipun hampir semua rumah tangga merebus air untuk minum, namun sebagian dari air tersebut masih mengandung bakteri E-coli. Hal ini menunjukkan arti pentingnya kampanye serta komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) untuk menumbuhkan kesadaran dan mengubah perilaku masyarakat. Saat ini, upaya KIE telah dilakukan namun masih kurang memadai. Hal ini mencerminkan masih rendahnya prioritas yang diberikan oleh para pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan KIE.

6) Masih terbatasnya penyedia air minum yang layak baik oleh PDAM dan non-PDAM yang sehat (kredibel dan profesional), terutama di daerah perkotaan.

Kinerja PDAM yang tidak baik dapat semakin diperburuk oleh anggapan masyarakat bahwa air adalah sesuatu yang dapat diperoleh secara cuma-cuma, bukan merupakan komoditas yang langka. Hal ini membuat masyarakat enggan membayar iuran air minum, yang pada akhirnya mempersulit penyedia layanan untuk meningkatkan layanannya melalui investasi baru. Penetapan dan pengaturan tarif belum memenuhi prinsip pemulihan biaya (full-cost recovery). Di samping itu, dalam penyediaan air minum berbasis masyarakat, kualitas sumber daya manusia pada lembaga pengelola juga masih menjadi kendala.

7) Masih terbatasnya kapasitas pemerintah daerah untuk menangani sektor air minum dan sanitasi, padahal penyediaan dan pengelolaan air minum dan sanitasi yang layak telah menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Dukungan perencanaan dan penganggaran untuk penyediaan air minum dan sanitasi yang layak belum menjadi prioritas, tercermin dari rendahnya alokasi anggaran daerah dalam mendukung pembangunan baru maupun perbaikan infrastruktur air minum dan sanitasi yang telah ada. Selain itu, masih minimnya kapasitas sumber daya manusia pelaksana pembangunan air minum dan sanitasi di daerah juga menjadi kendala penyediaan air minum dan sanitasi.

8) Investasi sistem penyediaan air minum dan sanitasi yang layak masih kurang memadai, baik dari pemerintah maupun swasta.

Hal tersebut antara lain diakibatkan oleh pendanaan yang masih bertumpu pada anggaran Pemerintah Pusat. Rendahnya kinerja keuangan PDAM juga menyebabkan PDAM sulit mendapatkan sumber pendanaan alternatif. Sementara itu, sumber pendanaan dari pihak swasta, baik dalam bentuk Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) ataupun Corporate Social Responsibility (CSR) masih belum dimanfaatkan secara signifikan.

a. AIR MINUM

Tantangan dan kendala yang dihadapi oleh Kabupaten Penajam Paser Utara dalam pemenuhan 100% akses air minum aman terhadap masyarakat antara lain kendala teknis, sosial, kelembagaan, pendanaan dan lingkungan.

1) Teknis

Tantangan teknis yang dihadapi adalah:

- Perbaikan kualitas sumber air baku dari pencemaran
- Pengurangan tingkat kebocoran pada jaringan lama dengan melakukan rehabilitasi jaringan
- Peningkatan teknologi pengolahan air yang efisien dan terjangkau
- Pencarian sumber air baku alternatif yang andal

2) Sosial

Tantangan sosial yang dihadapi adalah:

- Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, sehingga kebutuhan akan air minum juga meningkat;

3) Kelembagaan

Tantangan kelembagaan yang dihadapi adalah:

- Belum optimalnya kapasitas kelembagaan pengelolaan air minum terutama di wilayah perdesaan;
- Belum tersedianya acuan pelaksanaan program bidang air minum dan penyehatan lingkungan yang disepakati sebagai kebijakan Kabupaten Penajam Paser Utara
- Belum ada peraturan daerah yang mengatur kebijakan pengelolaan air minum secara komprehensif (Dinas Perumahan)
- Belum optimalnya koordinasi antar program dan antar pelaku bidang air minum
- Rendahnya kemampuan aparat untuk mendorong berdirinya lembaga kelompok pemanfaatan air bersih

4) Pendanaan

Tantangan pendanaan yang dihadapi adalah:

- Kebutuhan anggaran untuk kegiatan AMPL semakin meningkat;
- Program kegiatan AMPL belum menjadi skala prioritas baik di daerah maupun di desa;
- Kondisi keuangan Pemerintah Daerah yang tidak memungkinkan sehingga perlu Meningkatkan sumber pendanaan lainnya
- Masih sangat minimnya akses sumber pendanaan dari pihak lain dalam hal ini dunia usaha dan masyarakat;
- Belum termanfaatkannya dana desa untuk kegiatan AMPL.

5) Lingkungan

Tantangan dari aspek lingkungan yang dihadapi adalah:

- Banyaknya kegiatan usaha yang mengakibatkan menurunnya cadangan air tanah;

- Terjadinya pencemaran lingkungan oleh kegiatan pertambangan dan perkebunan;
- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan.
- Pelunya menjaga daerah aliran sungai dari degradasi lingkungan

b. SANITASI

Sama seperti pemenuhan air minum, Kabupaten Penajam Paser Utara juga mengalami beberapa tantangan dan kendala dalam pemenuhan 100% akses sanitasi layak dan aman bagi masyarakat. Tantangan tersebut antara lain teknis, sosial, kelembagaan, pendanaan dan lingkungan.

1) Teknis

Tantangan teknis yang dihadapi dalam pemenuhan kebutuhan 100% sanitasi layak adalah:

- Masih terdapat 6,24% (3.430 KK) di Kabupaten Penajam Paser Utara yang masih melakukan BABS;
- Belum tersedianya sarana air bersih sebagai penunjang sanitasi.
- Cakupan layanan sanitasi yang sangat rendah
- Pemerintah provinsi dan daerah belum melakukan upaya percepatan program STBM secara maksimal
- Kurangnya perhatian pemerintah provinsi dan daerah terhadap kesinambungan dan keberlanjutan program sanitasi.

2) Sosial

Tantangan sosial yang dihadapi dalam pemenuhan kebutuhan 100% sanitasi layak adalah:

- Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi di beberapa kecamatan;
- Rendahnya kesadaran masyarakat terkait perubahan perilaku hidup bersih dan sehat;
- Kebiasaan yang menjadi budaya di masyarakat;
- Masih banyak masyarakat yang mendiami bantaran sungai.

3) Kelembagaan

Tantangan kelembagaan yang dihadapi dalam pemenuhan kebutuhan 100% sanitasi layak adalah:

- Belum menyatunya visi dan misi antar kelembagaan terkait yang ada di Pemerintah Daerah dalam pencapaian akses 100% sanitasi layak dan aman bagi masyarakat;
- Belum terencana program kegiatan air minum dan penyehatan lingkungan secara baik dan terukur.
- Belum optimalnya koordinasi antar program dan antar pelaku bidang sanitasi
- Belum ada peraturan daerah yang mengatur kebijakan pengelolaan secara komprehensif
- Lemahnya basis data dan sistem informasi sanitasi
- Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundangan

4) Pendanaan

Tantangan pendanaan yang dihadapi dalam pemenuhan kebutuhan 100% sanitasi layak adalah:

- Kebutuhan anggaran untuk kegiatan Sanitasi semakin meningkat;
- Program kegiatan Sanitasi belum menjadi skala prioritas baik di daerah maupun di desa;
- Kondisi keuangan Pemerintah Daerah yang tidak memungkinkan;
- Masih sangat minimnya akses sumber pendanaan dari pihak lain dalam hal ini dunia usaha dan masyarakat;
- Belum termanfaatkannya dana desa untuk kegiatan Sanitasi.

Kondisi sanitasi yang kurang baik dan pola hidup masyarakat yang kurang sehat dapat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, berikut beberapa perilaku masyarakat yang dapat mempengaruhi kesehatan :

- a. Buang Air Besar Sembarangan (BABS)
- b. Buang Sampah Sembarangan
- c. Masih rendahnya kesadaran pola cuci tangan pakai sabun (CTPS)
- d. Kebersihan Jamban
- e. Perilaku pada penyimpanan dan penanganan air

BAB III

ISSUE STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Issue Strategis

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, proporsi penduduk dengan akses air minum aman di Kabupaten Penajam Paser Utara sampai dengan Tahun 2018 adalah 52,09 % dan proporsi penduduk dengan akses sanitasi layak adalah 72,07 %. Dibandingkan dengan perkotaan, kondisi di perdesaan relative lebih rendah.

Sesuai dengan komitmen pencapaian *Universal Access*, maka pada akhir 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara mampu mencapai kondisi 100% penduduk memiliki akses air minum aman dan 100% penduduk memiliki akses sanitasi layak. Dengan kata lain, Kabupaten Penajam Paser Utara harus mampu menyediakan tambahan akses air minum bagi 82.828 jiwa penduduk dan tambahan akses sanitasi bagi 48.277 jiwa penduduk.

Untuk mencapai target AMPL tersebut, Kabupaten Penajam Paser Utara dihadapkan pada sejumlah isu strategis yang akan ditangani sampai dengan 2023, yaitu:

1. Aspek teknis
 - a. Kapasitas sumber air baku yang diolah melalui PDAM pada saat ini hanya mencapai 120 lt/detik. Untuk menyediakan tambahan akses air minum dan sanitasi sampai dengan 2023, diperlukan tambahan kapasitas sumber air baku sebesar 231 lt/detik. Penambahan kapasitas ini dihadapkan pada kendala : kesulitan sumber air baku, kepunahan potensi sumber air baku, kapasitas bangunan pengambilan air baku dan jaringan pipa transmisi, tingginya tingkat pencemaran pada sumber air baku, dll.

- b. Kapasitas produksi saat ini hanya mencapai 40,26 lt/detik. Untuk menyediakan tambahan akses air minum sampai dengan 2023, diperlukan tambahan kapasitas produksi sebesar 187 lt/detik. Penambahan kapasitas ini dihadapkan pada kendala kesulitan teknologi pengolahan air minum, kapasitas instalasi pengolahan air, dll.
- c. Kapasitas distribusi saat ini hanya mencapai 38,29 lt/detik. Untuk menyediakan tambahan akses air minum sampai dengan 2023, diperlukan tambahan kapasitas distribusi sebesar 285,71 lt/detik. Penambahan kapasitas ini dihadapkan pada kendala kapasitas reservoir distribusi, kesulitan pengembangan jaringan pipa distribusi, kinerja pompa distribusi, tingkat kehilangan air, dll.
- d. Kapasitas pelayanan saat ini hanya mencapai 47.634 jiwa. Untuk menyediakan tambahan akses air minum dan sanitasi sampai dengan 2023, diperlukan tambahan kapasitas pelayanan sebesar 100.691 jiwa. Penambahan kapasitas ini dihadapkan pada kendala keterbatasan dana, factor kerusakan sarana air minum/sarana air bersih, keterbatasan pengelolaan sambungan rumah, sambungan non domestic, tingkat pemanfaatan kran umum, hidran umum, terminal air, dll.

2. Aspek Sosial

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan PHBS
- b. Mayoritas masyarakat perdesaan berpandangan bahwa air bersih haruslah murah bahkan gratis.

3. Aspek Lingkungan

- a. Masih tingginya kebutuhan konservasi sumber daya air untuk menjamin kepastian pasokan air baku yang dapat diandalkan,
- b. Masih kurangnya pengelolaan lingkungan terutama untuk konservasi dan perlindungan mata air.

4. Aspek Kelembagaan

- a. Belum tersedianya acuan pelaksanaan program bidang air minum dan penyehatan lingkungan yang disepakati sebagai kebijakan AMPL sampai dengan 2024, misalnya Perda untuk pengaturan

- Dana Desa yang mengakomodasi keperluan dasar AMPL (selain infrastruktur)
- b. Kesiapan KPSPAMS di desa-desa Pamsimas sebagai penyedia layanan air minum dan sanitasi perdesaan,
 - c. Perlunya penguatan kapasitas kelembagaan pengelola pelayanan air minum dan sanitasi di masyarakat.
5. Aspek Pendanaan
- a. Masih minimnya alokasi APBD untuk AMPL dalam tiga tahun terakhir,
 - b. Belum optimalnya fasilitasi pemerintah daerah untuk melibatkan dunia usaha dan lembaga donor dalam pendanaan pembangunan air minum dan sanitasi.
 - c. Belum optimalnya pemanfaatan dana desa untuk air minum dan sanitasi;

Tabel : 3.1
Rekapitulasi penambahan cakupan akses terhadap air minum sampai dengan Tahun 2023

Tahun	2018	2023
1. Cakupan Penduduk dengan akses air minum layak (%)	52,09%	100%
2. Cakupan Penduduk Perkotaan dengan akses air minum layak (%)	34,43%	100%
3. Cakupan Penduduk Perdesaan dengan akses air minum layak (%)	17,66%	100%
4. Jumlah Penduduk dengan akses air minum layak (jiwa)	90.039	190.730
5. Jumlah Penduduk Perkotaan dengan akses air minum layak (jiwa)	59.513	92.281
6. Jumlah Penduduk Perdesaan dengan akses air minum layak (jiwa)	30.526	98.449
7. Tambahan penduduk dengan akses air minum layak (jiwa)	82.828	100.691
8. Tambahan penduduk perkotaan dengan akses air minum layak (jiwa)	22.989	32.768
9. Tambahan penduduk perdesaan dengan akses air minum layak (jiwa)	59.839	67.923

Berdasarkan tambahan cakupan akses terhadap air minum, proyeksi kebutuhan air minum sampai dengan 2023 ditampilkan pada Tabel 3.3 berikut. Proyeksi kebutuhan air minum ini disusun berdasarkan tingkat pelayanan (cakupan pelayanan), tingkat konsumsi air, dan penurunan kehilangan air.

Tabel 3.2.
Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Penajam Paser Utara
sampai dengan Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
A	Kependudukan						
1	Jumlah penduduk	jiwa	176.264	179.746	183.316	186.977	190.730
2	Tingkat pelayanan	%	57,0%	65,0%	72,0%	79,0%	85,0%
3	Penduduk terlayani	jiwa	100.470	116.835	131.988	147.712	162.120
4	Jumlah penduduk /SR	jiwa	6	6	6	6	6
B	Kebutuhan Domestik						
1	Jumlah SR	unit	16.745	19.472	21.998	24.619	27.020
2	Pemakaian per orang	Lt/hari	100	100	100	100	100
3	Kebutuhan air SR	Lt/det	10.047	11.683	13.199	14.771	16.212
4	Kebutuhan Domestik	Lt/det	116	135	153	171	188
C	Kebutuhan Non Domestik		15	15	15	15	15
	15% dari Kebutuhan Domestik	Lt/det	1.507	1.753	1.980	2.216	2.432
	Total kebutuhan non domestik	Lt/det	17	20	23	26	28
D	Kebutuhan air total	Lt/det	134	156	176	197	216
E	Kehilangan air						
	% Kehilangan air	%	37,00	35,00	30,00	25,00	25,00
	Jumlah kehilangan air	Lt/det	49	54	53	49	54
F	Kebutuhan air rata-rata (D+E)	Lt/det	183	210	228	246	270
G	Kebutuhan harian maksimum						
	a. Faktor koefisien		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
	b. Kebutuhan air	Lt/det	220	252	274	295	324
H	Kebutuhan jam puncak						
	c. Faktor koefisien		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	d. Kebutuhan air	Lt/det	275	315	343	369	405

Dalam rangka memenuhi proyeksi kebutuhan air tersebut, maka isu strategis pengembangan SPAM Kabupaten Penajam Paser Utara yang akan ditangani sampai dengan 2023 mendatang adalah sebagai berikut:

1. Aspek Teknis

a. Jaringan perpipaan

- Pemenuhan kebutuhan unit air baku mencakup : 216 Lt/det
- Pemenuhan kebutuhan unit produksi mencakup : 405 Lt/det
- Pemenuhan kebutuhan unit distribusi mencakup : 324 Lt/det

b. Bukan jaringan perpipaan

Pada sistem bukan jaringan perpipaan, isu strategis pada aspek teknis mencakup:

Tantangan teknis dalam mengubah pelayanan bukan jaringan perpipaan belum terlindungi menjadi pelayanan bukan jaringan perpipaan terlindungi.

2. Aspek Non Teknis

Dalam pengembangan SPAM, Kabupaten Penajam Paser Utara dihadapkan pada sejumlah isu terkait non teknis. Isu-isu strategis terkait aspek non teknis yang akan ditangani sampai dengan 2023, yaitu sbb:

- a. Kelembagaan (penyelenggara pelayanan) mencakup: pembentukan asosiasi Spams Perdesaan serta peningkatan kemampuan kelembagaan pengelola sarana air minum dan sanitasi khususnya di perdesaan, termasuk isu perluasan pelayanan air minum dengan penyelenggara oleh kelompok masyarakat/koperasi, atau lembaga seperti KPSPAMS
- b. Pengaturan mencakup: tersedianya acuan pelaksanaan program bidang air minum dan penyehatan lingkungan yang disepakati sebagai kebijakan Kabupaten Penajam Paser Utara sampai dengan 2024.
- c. Pembiayaan mencakup: meningkatkan dan memprioritaskan program dan kegiatan AMPL dalam kebijakan penganggaran daerah serta memfasilitasi untuk melibatkan dunia usaha dan lembaga donor dan lain-lain dalam pendanaan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan, termasuk isu pelibatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan SPAM perdesaan berbasis masyarakat.

Isu dan Permasalahan mendesak sub sektor Air Limbah adalah :

- Masyarakat masih buang air besar sembarangan (BABS) di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara sebanyak 6,24 % (3.430 KK),
- Tangki septik di tingkat masyarakat tidak pernah dikuras,
- Limbah rumah tangga disalurkan langsung ke drainase/sungai,
- Pelayanan truk sedot tinja masih belum melayani masyarakat,
- Ada IPLT Buluminung, tetapi belum beroperasi secara maksimal,
- Belum adanya peraturan yang mengatur pengelolaan air limbah secara menyeluruh,
- Minimnya alokasi anggaran APBD untuk sanitasi,
- Belum ada regulasi yang mengatur tentang sektor air limbah,
- Kurangnya kualitas SDM dalam pengelolaan air limbah,
- Belum adanya keterlibatan dan peran serta pihak Swasta/masyarakat dalam penanganan air limbah,
- Kurangnya kampanye dan sosialisasi tentang penanganan air limbah rumah tangga.

Isu dan Permasalahan mendesak sub sektor Persampahan adalah :

- 34,16 % Jumlah penduduk perkotaan yang telah memiliki akses dalam pengelolaan sampah
- 39,13 % Jumlah penduduk pedesaan yang telah memiliki akses dalam pengelolaan sampah
- Sampah yang sudah terangkut ke TPA di perkotaan mencapai 34,16% dan di pedesaan 39,13%. Sedangkan sampah yang tidak terproses di wilayah perkotaan sebesar 0,47% dan di pedesaan 26,23%
- Pengumpulan hanya dilakukan pada wilayah padat penduduk (sampah terangkut masih 73,29%),
- Sampah tidak dipilah dari sumbernya,
- Jumlah kontainer dan truk pengangkut masih sangat kurang,
- Desain bak sampah yang ada kurang mendukung untuk mempercepat pemuatan sampah ke atas kendaraan yang digunakan,
- Pengangkutan sampah ke TPA masih menggunakan kendaraan yang konstruksi dan sarananya belum memperhatikan resiko pencemaran lingkungan di sepanjang perjalanan,
- Belum ada masterplan persampahan,
- Rendahnya pendapatan/hasil penarikan dana redistribusi,
- Keterbatasan anggaran untuk pengembangan TPA dan sarana persampahan lainnya,

- Penerapan sanksi hukum dari Perda belum efektif,
- Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah masih rendah,
- Belum mempunyai mitra potensial untuk pengelolaan persampahan,
- Kurangnya publikasi dan kampanye tentang pengelolaan sampah pada tempat-tempat strategi.

Isu dan Permasalahan mendesak sub sektor Drainase adalah :

- Masih terdapat genangan seluas 58,4 Ha, yang tersebar di wilayah kecamatan Penajam seluas 51,40 Ha, di kecamatan waru seluas 2 Ha, di kecamatan Babulu seluas 2 Ha dan di Sepaku seluas 3 Ha.
- Gorong-gorong dipermukaan jalan dimensinya terlalu kecil,
- Adanya sendimentasi dari sampah dan lumpur pada saluran drainase, grey water masih bercampur dengan saluran drainase, dan belum ada sumur resapan,
- Belum terpisahnya antara saluran drainase dengan irigasi,
- Dana untuk pemeliharaan saluran drainase masih rendah (dapat terukur),
- Belum mempunyai Peraturan Daerah tentang pengelolaan drainase perkotaan,
- Kurangnya kegiatan media komunikasi terkait pengelolaan drainase perkotaan sehingga masih ada masyarakat yang membuang sampah di selokan,
- Masih belum adanya peran swasta dan masyarakat dalam pengelolaan drainase perkotaan.

3.2. Arah Kebijakan 2019-2023

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Periode Tahun 2019-2023 menetapkan bahwa Misi dan Visi Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebagai berikut :

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara periode 2019-2023, adalah : "**TERWUJUDNYA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA YANG MAJU, MODERN DAN RELIGIUS**".

Penjabaran arti dari visi tersebut antara lain :

1. Terwujudnya Kabupaten Penajam Paser Utara yang maju adalah: Meningkatkan kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan kemantapan system dan kelembagaan politik dan hukum.
2. Terwujudnya Kabupaten Penajam Paser Utara yang modern adalah: Mampu dan setara dalam menerapkan dan mensenergikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat dengan kemajuan teknologi kekinian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
3. Terwujudnya Kabupaten Penajam Paser Utara yang religius : Mewujudkan kehidupan masyarakat sejajar, sederajat dan seimbang dunia & akhirat menuju masyarakat berakhlak mulia, aman dan damai serta hidup berdampingan antara sesame pemeluk agama dilandaskan Lakum dinnukum Waliyadin dan Pancasila.

Misi untuk mencapai cita-cita dalam visi dituangkan dalam 11 (sebelas) Misi ,yakni :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomidan pendapatan masyarakat serta mengurangi angka pengangguran
Maksud misi ini adalah :

Peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengembangan UMKM dengan mendapatkan bantuan pendampingan dan stimulant dana.
2. Pembangunan infrastruktur & konektivitas kawasan serta industry terpadu
Maksud misi ini adalah :

Pembangunan infrastruktur dasar akan menarik investasi masuk kekawasan industry Buluminung (KIB) dan menjadikannya sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) di Kalimantan Timur.
3. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan dasar dalam pemenuhan hak dasar masyarakat bidang pendidikan dan kesehatan,
Maksud misi ini adalah :

A. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara yang memiliki pendidikan tinggi sehingga berdaya saing di tingkat regional, nasional bahkan international.

- B. Mewujudkan pelayanan kesehatan secara optimal terutama pada wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.
4. Meningkatkan dan mengembangkan sector pertanian dalam arti luas.
Maksud misi ini adalah:
- A. Mewujudkan peningkatan produksi pertanian melalui penyediaan air baku irigasi yang mencukupi sehingga target 3 x panen dalam setahun dapat tercapai.
- B. Mekanisasi pengolahan lahan hingga produksi.
5. Mengakselerasi laju mesin-mesin pertumbuhan dalam proses produksi Agribisnis, Agroindustri, Pariwisata, Perdagangan dan Jasa serta kerjasama lokal, regional, maju dan berkelanjutan
Maksud misi ini adalah:
- A. Meningkatkan nilai tambah, daya saing produk, dan kontribusi ekspor.
- B. Kerjasama lokal, regional, maju dan berkelanjutan dalam peningkatan pertumbuhan.
6. Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kreatif kerakyatan, perekonomian berbasis perdesaan dan kelurahan serta kelompok masyarakat minoritas, terpencil dan terpinggirkan, melalui pembangunan desa dan kelurahan serta pembangunan kawasan perdesaan dan kelurahan.
Maksud misi ini adalah:
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan kelurahan melalui pembangunan desa dan kelurahan.
7. Meningkatkan infrastruktur daerah melalui prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energy listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan serta permukiman,
Maksud misi ini adalah:

- A. Meningkatkan infrastruktur daerah melalui prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energy listrik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daya saing dan iklim investasi.
 - B. Meningkatkan infrastruktur daerah melalui pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan yang digunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran masyarakat.
 - C. Mewujudkan penataan ruang dan perumahan serta permukiman yang layak bagi masyarakat.
8. Peningkatan penerimaan daerah dan pengembangan sumber pendapatan non migas.
Maksud misi ini adalah:
- A. Meningkatkan penerimaan PAD dari sumber-sumber yang belum tergali secara optimal.
 - B. Meningkatkan sumber pendapatan non migas dengan mengembangkan hilirisasi industri.
9. Memperkuat kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan berkualitas.
Maksud misi ini adalah :
- Meningkatkan sumber daya aparatur dalam pelayanannya kepada masyarakat melalui optimalisasi kemampuan sumber daya aparatur dalam lembaga pemerintahan guna peningkatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih KKN, professional, akuntabel dan menjunjung tinggi nilai nilai ahlaqul karimah muslimin yang mayoritas masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara beragama Islam.
10. Pengembangan system informasi yang handal dan modern dalam upaya peningkatan dan pengembangan layanan pemerintahan dan ekonomi daerah.
Maksud misi ini adalah:
- Melalui pengembangan system informasi tentunya akan mempermudah dalam mengakses layanan informasi terkait pemerintahan dan ekonomi daerah

11. Peningkatan kerukunan umat beragama sebagai modal dan perekat kesatuan yang bertumpu pada solidaritas dan sinergitas untuk pembangunan menuju masyarakat Penajam Paser Utara yang maju, modern dan religius.

Maksud misi ini adalah:

Kerukunan umat beragama merupakan modal dasar terciptanya kondusifitas kehidupan bermasyarakat ditengah keberagaman yang ada. Dengan meningkatnya kerukunan umat beragama tentunya menjadi modal dasar dan alat pemersatu, yang akan menciptakan kehidupan bermasyarakat yang solid dan mampu bersinergi, guna mendukung pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing, berbasis teknologi dan berdasarkan nilai-nilai luhur kehidupan beragama.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi serta Prioritas Pembangunan Daerah tersebut, maka arah kebijakan pembangunan yang dinilai akan berimplikasi pada pelayanan AMPL Daerah adalah sebagai berikut :

Misi3 : Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan dasar dalam pemenuhan hak dasar masyarakat bidang pendidikan dan kesehatan,

Strategi ; Peningkatan kualitas kesehatan

Arah Kebijakan ; Peningkatan layanan dasar kesehatan masyarakat dan Pengembangan lingkungan sehat

Misi.7; Meningkatkan infrastruktur daerah melalui prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energy listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan serta permukiman.

Strategi ; Peningkatan infrastruktur dasar

Arah Kebijakan; Peningkatan infrastruktur dasar, Peningkatan pengelolaan lingkungan dan Penataan ruang daerah serta Pengembangan perumahan dan permukiman yang layak

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi serta Prioritas Pembangunan Daerah tersebut, kebijakan pembangunan yang dinilai akan berimplikasi pada pelayanan AMPL Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Kebijakan Pencapaian RPJMN dan Penurunan Angka Kemiskinan serta Pengangguran. Sebagaimana kita ketahui bahwa Target Universal Access terhadap air minum aman dan sanitasi layak hingga tahun 2019. Dengan kebijakan ini maka peningkatan cakupan air minum dan penyehatan lingkungan termasuk dalam kebijakan yang akan dilaksanakan kedepan.
- b. Kebijakan Pendidikan dan Kesehatan, memerlukan dukungan system penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan yang tidak saja melayani keluarga namun juga pemukiman sekitaryang belum dilayani system penyediaan air minum dan pengolahan air limbah. Disamping itu termasuk didalamnya adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah menjadi prioritas kelompok sasaran upaya-upaya peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, melalui peningkatan cakupan akses air minum dan sanitasi. Dengan kebijakan ini maka pemenuhan pelayanan air minum dan sanitasi untuk mendukung pendidikan dan kesehatan juga menjadi prioritas.
- c. Kebijakan Pariwisata dan Lingkungan Hidup; dengan kebijakan ini maka peningkatan cakupan layanan air minum dan penyehatan lingkungan termasuk dalam kebijakan yang menjadi prioritas pembangunan kedepan.
- d. Kebijakan Infrastruktur Yang Berkeadilan, dengan kebijakan ini berarti peningkatan kualitas layanan air minum serta sanitasi juga menjadi prioritas pembangunan daerah.

Peningkatan kapasitas pelayanan bidang air minum dan sanitasi sampai dengan 2023 di Kabupaten Penajam Paser Utara bertujuan untuk:

1. Meningkatkan cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan
2. Meningkatkan cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan
3. Meningkatkan kapasitas sumber air baku.
4. Meningkatkan Kapasitas produksi
5. Meningkatkan kapasitas distribusi

6. Meningkatkan kapasitas pelayanan
7. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
8. Meningkatkan kapasitas pengelolaan lingkungan dan konservasi serta perlindungan mata air.
9. Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola pelayanan air minum dan sanitasi
10. Meningkatkan pendanaan baik melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, serta melibatkan dunia usaha dan lembaga donor dalam pembangunan air minum dan sanitasi.

Adapun sasaran yang ditargetkan tercapai sampai dengan akhir 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan dari 52,09 % menjadi 100 %
2. Meningkatnya cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan dari 72,07 % menjadi 100 %
3. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap PHBS dari 60 % menjadi 85 %
4. Meningkatkan kapasitas pengelola sarana prasarana AMPL menjadi 100 %

Tabel 3.4 menunjukkan pentahapan pencapaian sasaran 2019 - 2023.

Table 3.4
Tujuan dan Sasaran Pembangunan AMPL Jangka Menengah
Kabupaten Tahun 2019 - 2023
(SESUAI RPJMD)

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	3.1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan Berkarakter	3.1.1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatnya wilayah bebas endemis penyakit	✓	✓	✓	✓	✓
2.			Meningkatnya capaian target balita kurang gizi dan ibu hamil KEK mendapat PMT	✓	✓	✓	✓	✓
3.			Meningkatnya kualitas pelayanan promosi dan pemberdayaan masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓
4.			Kecamatan /Desa /Kelurahan yang sehat	✓	✓	✓	✓	✓
5.			Meningkatkan kesadaran masyarakat untk melakukan skrining kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓
6.			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Lingkungan	✓	✓	✓	✓	✓
7.	7.1. Memantapkan Infrastruktur Daerah	7.1.1. Terwujudnya Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan	Persentase penduduk berakses air minum	✓	✓	✓	✓	✓
8.			Panjang normalisasi sungai	✓	✓	✓	✓	✓
9.			Jumlah kelompok masyarakat pengelola SPAM berbasis Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓
10.			Persentase jalan yang memiliki drainase	✓	✓	✓	✓	✓
11.	7.2. Mewujudkan Penataan Ruang yang Berkesesuaian Dengan RTRW	7.2.1. Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Penataan Perumahan dan Permukiman	Persentase Cakupan Sanitasi (septik Komunal) Permukiman Terbangun	✓	✓	✓	✓	✓
12.			Panjang Saluran Drainase Permukiman Terbangun	✓	✓	✓	✓	✓
13.			Peningkatan Kualitas Rumah Layak Huni	✓	✓	✓	✓	✓
14.			Peningkatan sambungan rumah tangga terpasang	✓	✓	✓	✓	✓

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			(SR)					
15.			Tersedianya bangunan konservasi tanah dan air	✓	✓	✓	✓	✓
16.			Persentase timbulan sampah yang tertangani	✓	✓	✓	✓	✓
17.			IKLH	✓	✓	✓	✓	✓
18.			Luas penanaman pada Kanan Kiri Sungai, Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan Air (DTA), Sekitar Mata Air dan Daerah Imbuhan Air Tanah	✓	✓	✓	✓	✓

Penetapan pentahapan pencapaian sasaran (Tabel 3.4) di atas digunakan sebagai acuan perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 2019-2023. Program dan kegiatan AMPL 2019 - 2023, baik yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBD Provinsi, APBN, maupun sumber pendanaan lainnya harus berorientasi pada upaya pencapaian sasaran 2019-2023 tersebut.

3.3. Strategi Pencapaian 2019-2023

Berdasarkan arah kebijakan, tujuan dan sasaran peningkatan pelayanan AMPL Kabupaten Penajam Paser Utara 2019-2023, strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Memprioritaskan perluasan cakupan pelayanan PDAM pada kawasan perkotaan dan kawasan pengembangan pelayanan PDAM (kawasan potensial PDAM)
2. Menerapkan pendekatan berbasis masyarakat untuk perluasan cakupan akses air minum yang aman dan berkelanjutan di kawasan perdesaan dan kawasan yang tidak terjangkau pelayanan PDAM
3. Menggalang kerjasama pendanaan dengan dunia usaha bagi perluasan akses air minum dan sanitasi pada kawasan-kawasan komersil, maupun di kawasan perdesaan;
4. Menggali pendanaan dari berbagai sumber yang dapat dimanfaatkan untuk air minum dan sanitasi di daerah;
5. Mendorong pemanfaatan dana desa untuk dimanfaatkan dalam bidang air minum dan sanitasi;

6. Menggalakkan program STBM bagi desa/kawasan yang belum mencapai 100% akses sanitasi.
7. Menggalakkan kampanye PHBS melalui mobilisasi tenaga promosi kesehatan, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, dan media massa
8. Meningkatkan konservasi, pengelolaan dan pengawasan sumber daya air untuk menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pasokan air baku
9. Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas pelaku pembangunan air minum dan sanitasi melalui penguatan peran Bappeda
10. Meningkatkan alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan investasi AMPL Kabupaten Penajam Paser Utara dalam rangka pencapaian target Universal Access. Baik melalui APBD Kabupaten, maupun mengupayakan melalui pendanaan APBD provinsi, APBN, CSR, dunia usaha, dan lembaga donor lainnya.
11. Meningkatkan kapasitas Pengelola Spams Perdesaan

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan isu strategis, arah kebijakan, dan strategi pembangunan AMPL, maka program prioritas AMPL Kabupaten Penajam Paser Utara sampai dengan 2023 adalah sebagai berikut:

4.1 Program dan kegiatan bidang Air Minum 2019-2023

1) Program Pengembangan SPAM

Program prioritas pengembangan SPAM terdiri dari:

a) Program unit air baku meliputi:

- Kegiatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam
- Kegiatan pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya
- Kegiatan penyelamatan dan pelestarian sumber mata air.
- Kegiatan Penelitian dan pengembangan sumber air baku baru.

b) Program unit produksi meliputi:

- Kegiatan Peningkatan kapasitas produksi
- Kegiatan Pemeliharaan dan pembangunan reservoir
- Kegiatan Pembangunan, pemeliharaan dan optimalisasi kapasitas bronchapturing.
- Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium.

c) Program unit distribusi meliputi:

- Kegiatan Pemeliharaan , pengembangan dan pembangunan jaringan transmisi dan distribusi.
- Kegiatan Penambahan Sambungan Rumah / SR.
- Kegiatan Pemasangan dan penggantian meter induk

- Kegiatan Pemutakhiran data dan sistem jaringan.
- d) Program unit pelayanan meliputi:
- Kegiatan Penggantian meter pelanggan.
 - Kegiatan Meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan baik dalam hal pembayaran maupun pengaduan dll
 - Kegiatan Penataan ruang loket dan sarana penunjang.
 - Kegiatan Reklasifikasi golongan pelanggan.

2) Program Pengembangan Kapasitas Sistem

Program prioritas pengembangan kapasitas sistem air minum terdiri dari:

- a) Program pengembangan kapasitas pelayanan perkotaan meliputi :
- Kegiatan Meningkatkan kualitas produksi air
 - Kegiatan Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelanggan
 - Kegiatan Mengurangi kebocoran air
 - Kegiatan Rehabilitasi jaringan pipa distribusi
 - Kegiatan Menambah Sambungan Rumah / SR.
- b) Program pengembangan kapasitas pelayanan perdesaan meliputi:
- Kegiatan Pengembangan dan optimalisasi Spams Perdesaan.
 - Kegiatan Perluasan SPAMS Perdesaan melalui Program Pamsimas, DAK, Replikasi dan program-program lainnya.
 - Kegiatan Meningkatkan kapasitas Pengelola Spams Perdesaan.
 - Kegiatan Membentuk Asosiasi Spams Perdesaan

3) Program Penurunan Kebocoran Air Minum

Program prioritas penurunan kebocoran air minum terdiri dari:

- Kegiatan Identifikasi Sumber Kehilangan Air.
- Kegiatan Tera ulang meter air dan mengganti yang yang rusak, kurang baik atau tingkat keakuratannya rendah.
- Kegiatan Pembenahan jaringan distribusi dan mngganti pipa jaringan yang rusak, bocor dan yang sudah tidak layak pakai.
- Kegiatan Mengadakan pengawasan / inspeksi jaringan secara periodik untuk mengetahui adanya pipa yang bocor maupun adanya sambungan liar.
- Kegiatan Penyempurnaan sistem pelaporan.

4) Program Pengembangan SPAMS

Program prioritas pengembangan SPAMS Perdesaan meliputi:

- Kegiatan Pengembangan jaringan / sambungan rumah.
- Kegiatan Optimalisasi SPAMS perdesaan yang telah terbangun.
- Kegiatan Penguatan kelembagaan pengelola Spams Perdesaan.
- Kegiatan Memfasilitasi terbentuknya Asosiasi Pengelola Spams Perdesaan.
- Kegiatan Membangun infrastruktur air minum perdesaan melalui program Pamsimas, replikasi, DAK serta program-program lain baik yang didanai APBDesa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, CSR maupun lembaga donor lainnya.

5) Program Pengelolaan Lingkungan

Program prioritas pengelolaan lingkungan meliputi:

- Kegiatan Konservasi sumber daya air serta pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
- Kegiatan Peningkatan konservasi daerah tangkapan air.
- Kegiatan Penanaman tanaman di sekitar mata air, dengan tanaman keras.

- Kegiatan Pelestarian dan pengembangan keanekaragaman hayati.
- Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi sumberdaya alam.
- Kegiatan Penanganan kerusakan lingkungan

Tabel 4.1.

Program dan Kegiatan di Bidang Air Minum 2019-2023

No Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan"	Indikator Kinerja Program (outcome)	OPD Pelaksana
1.01.03.01.16	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Panjang normalisasi sungai (m')	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program penyediaan dan pengolahan air baku	Persentase penduduk berakses air minum	
1.01.03.01.18	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Jumlah kelompok masyarakat pengelola SPAM Berbasis Masyarakat	
1.01.04.01.02	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan	Peningkatan Sambungan Rumah Tangga Terpasang (SR)	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan
1.02.05.01.02	Pengadaan bangunan konservasi tanah dan air	tersedianya bangunan konservasi tanah dan air (titik)	Dinas Lingkungan Hidup
1.02.05.01.21	Penanaman Bambu Pada Kanan Kiri Sungai, Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan Air (DTA), Sekitar Mata Air dan Daerah Imbuhan Air Tanah	Luas penanaman bambu/ pohon pada Kanan Kiri Sungai, Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan Air (DTA), Sekitar Mata Air dan Daerah Imbuhan Air Tanah	

No Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan"	Indikator Kinerja Program (outcome)	OPD Pelaksana
		(Ha)	

4.2 Program dan Kegiatan di Bidang Sanitasi 2019-2023

1) Program Peningkatan Penerapan PHBS

Program prioritas peningkatan penerapan PHBS meliputi:

- Pengawasan kualitas air minum konsumsi masyarakat.
- Advokasi dan bimbingan teknis jamban sehat. \
- Advokasi dan pembinaan desa STBM.
- Bimbingan teknis dan pengawasan rumah sehat .
- Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di masyarakat.
- Pemeriksaan sampel makanan dan minuman serta sosialisasi keamanan pangan bagi siswa dan pedagang jajanan anak sekolah.
- Pembinaan kader posyandu.
- Evaluasi pelaksanaan desa siaga
- Pengembangan upaya kesehatan berbasis masyarakat.
- Peningkatan gerakan cuci tangan pakai sabun.

2) Program Penyediaan Kebutuhan Sanitasi

Program prioritas penyediaan kebutuhan sanitasi meliputi:

- Pembangunan jamban komunal.
- Pembangunan IPAL komunal.
- PPSP.
- Pembangunan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat
- Program pembangunan infrastruktur perdesaan.

- Penyediaan sarana dan prasarana pengolah limbah cair dan pembuatan biogas.

3) Program Pengelolaan Lingkungan

Program prioritas pengelolaan lingkungan meliputi:

- Pengembangan lingkungan sehat.

Tabel 4.2.

Program dan Kegiatan di Bidang Sanitasi 2019-2023

No Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan"	Indikator Kinerja Program (outcome)	OPD Pelaksana
1.01.02.1.19	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya wilayah bebas endemis penyakit	Dinkes
	Program Perbaikan gizi masyarakat	Meningkatnya capaian target Balita Kurang Gizi dan ibu hamil KEK mendapat PMT	
1.01.02.1.33	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan promosi dan pemberdayaan masyarakat	
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kecamatan/Desa/Kelurahan yang sehat	
	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Meningkatkan kesadaran masyarakat untk melakukan skrining kesehatan	
	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Meningkatnya angka harapan hidup	
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Tercapainya pengembangan kesehatan masyarakat	

No Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan"	Indikator Kinerja Program (outcome)	OPD Pelaksana
	Pengembangan dan Upaya Kesehatan Lainnya		
1.01.03.01.15	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase Cakupan Sanitasi (Septik Komunal) Pemukiman Terbangun (%)	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan
2.00.05.01.17	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Panjang Saluran Drainase/ Gorong-gorong Permukiman terbangun (meter)	
1.01.03.01.29	Program Pengembangan Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Layak Huni (unit)	
1.02.05.01.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah yang tertangani	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02.07.01.15		Tersedianya data rumah layak huni bagi keluarga miskin	
	Program Partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Angka partisipasi masyarakat	
	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Meningkatnya peran perempuan di pedesaan	
1.01.03.01.22	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Persentase jalan yang memiliki drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan

No Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan"	Indikator Kinerja Program (outcome)	OPD Pelaksana
			Penataan Ruang
	Program pengendalian banjir		
	Program Perencanaan Tata Ruang	Revisi RTRW	

BAB V

KEBUTUHAN INVESTASI

5.1. Perkiraan Kebutuhan Investasi

Perkiraan kebutuhan investasi pelayanan AMPL daerah bertujuan untuk mengetahui perkiraan investasi yang akan diperlukan dalam rangka pencapaian target RPJMN 2019.

Dengan adanya perkiraan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat mempersiapkan strategi pendanaan dan pilihan program/kegiatan yang lebih efektif dan efisien dalam mencapai kinerja yang ditargetkan.

Angka hasil perkiraan investasi merupakan gambaran biaya yang diperlukan daerah sebagai pertimbangan dalam peningkatan alokasi anggaran APBD untuk AMPL dan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan yang diusulkan untuk didanai APBD provinsi dan APBN, juga dunia usaha/perbankan, dan masyarakat.

Upaya pencapaian target kinerja AMPL Kabupaten Penajam Paser Utara sampai dengan tahun 2023 sebagaimana disebutkan diatas perlu didukung dengan komitmen penuh dari berbagai pihak yang terkait, baik dari segi sumber daya manusia maupun pendanaan. Sehubungan dengan itu, diperlukan perhitungan kebutuhan investasi yang matang guna menyiapkan strategi investasi dan pendanaan program AMPL. Sebagai acuan awal, perkiraan kebutuhan investasi dalam rangka pencapaian target kinerja AMPL Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tambahan akses sampai dengan 2023 dihitung berdasarkan target kabupaten/kota, baik pada air minum dan sanitasi. Berdasarkan tambahan akses tersebut, investasi air minum dihitung dengan menggunakan pendekatan kelembagaan, pendekatan pemberdayaan masyarakat, dan kombinasi antara pendekatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat. Penerapan pendekatan penghitungan investasi air minum didasarkan pada hasil pemetaan atas besar

tambahan akses yang dapat dipenuhi dengan pendekatan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, dan kombinasi keduanya.

Tabel 5.1.
Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Air Minum

Indikator	Kondisi saat ini (Tahun 2018)	Kondisi 2023	Tambahan cakupan pelayanan	Biaya investasi per orang (Rp)	Kebutuhan investasi sd 2023
Jumlah penduduk	172.867	190.730	17.863		
Jumlah penduduk yang dilayani	90.039	162.120	72.081	1.750.000	126.142.177.777
Cakupan penduduk yang dilayani (%)	52,09	85,00	32,91		
TOTAL					126.142.177.777

Investasi sanitasi dihitung dengan menggunakan pendekatan berbasis masyarakat, baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Tabel 5.2.
Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Sanitasi

Indikator	Kondisi saat ini (Tahun 2018)	Kondisi 2023	Tambahan cakupan pelayanan	Biaya investasi per orang (Rp)	Kebutuhan investasi sd 2023
Jumlah penduduk	172.867	190.730	17.863		
Jumlah penduduk yang dilayani	124.590	181.193	56.603	500.000	28.301.607.189
Cakupan penduduk yang dilayani (%)	72,07	95,00	22,93		
TOTAL					28.301.607.189

Berdasarkan capaian kinerja AMPL Kabupaten Penajam Paser Utara sampai dengan tahun 2018 , target pencapaian bidang air minum dan sanitasi, pada akhir 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara diharapkan mampu mencapai kondisi 100 % penduduk memiliki akses air minum layak dan 100 % penduduk memiliki akses sanitasi layak. Untuk mencapai kondisi tersebut, diperkirakan kebutuhan investasi selama 2019-2023 untuk air minum adalah Rp. 126.142.177.777,- dan untuk sanitasi dan penyehatan lingkungan adalah Rp. 28.301.607.189,-

Dengan meninjau Dokumen RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara 2019-2023 ternyata rencana Investasi di bidang AMPL secara umum sudah bisa menjawab tantangan permasalahan kebutuhan masyarakat seperti dalam tabel 5.3. dan tabel 5.4.

Tabel 5.3.
Nilai Investasi Bidang AMPL 2019-2023
Kabupaten Penajam Paser Utara

Bidang	Nilai Investasi (Rp)					Total 2019-2023
	2019	2020	2021	2022	2023	
Air Minum	139.987.173 .852	10.814.050 .000	15.500.000 .000	15.810.000 .000	17.070.100 .000	199.181.323 .852
Penyehatan Lingkungan	41.266.064. 500	22.966.487 .359	29.744.970 .973	30.337.159 .250	30.212.486 .260	150.433.413 .994
AMPL	181.253.238 .352	33.780.537 .359	45.244.970 .973	46.147.159 .250	47.282.586 .260	349.614.737 .846

5.2. Rencana Pembiayaan

Tabel 5.4.
Matrix RAD AMPL Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2019-2023

Kode	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir		Sumber Dana	Pengelola
					2019		2020		2021		2022		2023					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
						(Juta)		(Juta)		(Juta)		(Juta)		(Juta)		(Juta)		
1.01.0 2.1.19	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya wilayah bebas endemis penyakit	100%	100%	1.973,6	100%	2.013,1	100%	2.053,3	100%	2.094,4	100%	2.136,3	100%	10.270		Dinkes
	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Meningkatnya capaian target balita kurang gizi dan ibu hamil KEK mendapat PMT	0	0	0	10 balita gizi buruk 470 balita gizi kurang 400 bumil KEK	268,4	10 balita gizi buruk 470 balita gizi kurang 400 bumil KEK	271	10 balita gizi buruk 470 balita gizi kurang 400 bumil KEK	273,8	10 balita gizi buruk 470 balita gizi kurang 400 bumil KEK	276,5	10 balita gizi buruk 470 balita gizi kurang 400 bumil KEK	1.090		Dinkes
1.01.0 2.1.33	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan promosi dan pemberdayaan masyarakat	90%	95%	85	100%	86,7	100%	88,4	100%	90,2	100%	92	100%	442		Dinkes

	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kecamatan /Desa /Kelurahan yang sehat	55%	60%	329,5	70%	336,1	85%	342,8	95%	349,7	100%	356,7	100%	356		Dinke s
	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan skrining kesehatan	21.440 org	21.440 org	1.492	21.440 org	1.522	21.440 org	1.598	21.440 org	1.630	21.440 org	1.662,7	21440 org	7.905		Dinke s
	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Program Upaya Kesehatan Esensial	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100%	100%	2.735	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	2.735		Dinke s
1.01.0 3.01.1 6	Terwujudnya Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	Persentase penduduk berakses air minum	31,22%	32%	81.849	50%	0	65%	0	70%	0	75%	0	75%	49.471		DPUP R
1.01.0 3.01.1 6	Terwujudnya Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Panjang normalisasi sungai	6.500 (m1)	2.000 (m1)	11.052	4.000 (m1)	7.814	5.000 (m1)	10.000	4.000 (m1)	10.200	2.000 (m1)	10.404	23.500 (m1)	81.849		DPUP R
1.01.0 3.01.1 8	Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Air Minum dan Air	Jumlah kelompok masyarakat pengelola SPAM	0	10%	43.758	15%	3.000	20%	5.000	25%	5.100	30%	5.205	30%	62.061		DPUP R

	serta Penataan Perumahan dan Permukiman	Limbah	berbasis Masyarakat															
1.01.0 3.01.2 2	Terwujudnya Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan	Program Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong	Persentase jalan yang memiliki drainase	13%	19%	21.911	30%	5.693	40%	10.000	50%	10.200	61%	10.404	61%	58.209		DPUP R
	Terwujudnya Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan	Program Pengendalian Banjir	Persentase jalan yang memiliki drainase	13%	19%	465	30%	1.700	40%	4.000	50%	4.080	61%	4.161,6	61%	14.407		DPUP R
1.01.0 3.01.1 5	Terwujudnya Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase Cakupan Sanitasi (septik Komunal) Permukiman Terbangun	20%	21,6%	106,4	22,4%	701	23,2%	500	24,0%	510	24,8%	112,5	24,8%	2.026		DPKP P
1.01.0 3.01.1 7	Terwujudnya Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan	Program Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong	Panjang Saluran Drainase Permukiman Terbangun	61.420 m	67.562 m	3.000	0	0	79.846 m	500	85.988 m	510	92.130 m	510	92.310	4.520		DPKP P
1.01.0 3.01.2 9	Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Penataan Perumahan dan	Program Pengembangan Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Layak Huni	920 Unit	300 Unit	182	300 Unit	599,5	300 Unit	600	300 Unit	612	300 Unit	217,2	1.500 Unit	2.211		DPKP P

	Permukiman																	
1.01.0 4.01.0 2	Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Penataan Perumahan dan Permukiman	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Bersih Perdesaan	Peningkatan sambungan rumah tangga terpasang (SR)	220 SR	510 SR	1.453	0	0	200 SR	500	200 SR	510	200 SR	1.464	1.100 SR	3.927		DPKP P
1.02.0 5.01.0 2	Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Penataan Perumahan dan Permukiman	Pengadaan Bangunan Konservasi Tanah dan Air	Tersedianya bangunan konservasi tanah dan air	NA	190 titik	990,4	0	0	0	0	0	0	0	0	190 titik	990		DLH
1.02.0 5.01.1 5	Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Penataan Perumahan dan Permukiman	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah yang tertangani	25,27%	40%	8.720	60%	9.401	70%	9.401	80%	9.589,5	90%	9.781	90%	46.894		DLH
1.02.0 5.01.1 6	Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Penataan Perumahan	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	IKLH	NA	68,5	219,5	69,5	479,6	70,5	219,5	71,5	223,9	73,5	224,4		1.371		DLH

	dan Permukiman																	
1.02.0 5.01.1 7	Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Penataan Perumahan dan Permukiman	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	IKLH	NA	68,5	44,1	69,5	164,8	70,5	170	71,5	173,4	73,5	176,8		729		DLH
1.02.0 5.01.2 1	Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Penataan Perumahan dan Permukiman	Penanaman Bambu pada Kanan Kiri Sungai, Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan Air (DTA), Sekitar Mata Air dan Daerah Imbuan Air Tanah	Luas penanaman pada Kanan Kiri Sungai, Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan Air (DTA), Sekitar Mata Air dan Daerah Imbuan Air Tanah	NA	60 Ha	882	0	0	0	0	0	0	0	0	60 Ha	882		DLH
		Total Rencana Investasi			181.253	33.780	45.245	46.147	47.282	349.614								

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2019-2023 pada dasarnya dilakukan oleh semua pelaku atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) Kabupaten Penajam Paser Utara. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2019-2023 Kabupaten Penajam Paser Utara pada lembaga pemerintah daerah dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan mengukur hasil program terhadap pencapaian target AMPL 2024. Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2019-2023 Kabupaten Penajam Paser Utara juga menerima masukan hasil pemantauan dan evaluasi independen oleh lembaga-lembaga non pemerintah seperti LSM, perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi profesi, dan media massa. Hasil pemantauan dan evaluasi, baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah maupun lembaga non pemerintah diverifikasi dan dikonsolidasikan oleh Tim Penyusun RAD AMPL Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019-2023 untuk kemudian dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2019-2023 Kabupaten Penajam Paser Utara di tingkat lokal atau komunitas sepenuhnya merupakan prakarsa dan kegiatan masyarakat sendiri. Untuk itu dapat diberikan pendampingan dan/atau advokasi oleh Pokja AMPL/Tim Teknis Kabupaten Penajam Paser Utara maupun oleh LSM yang memiliki kompetensi dalam evaluasi kebijakan dan pelaksanaan pembangunan khususnya yang terkait dengan target RPJMN 2019

Tujuan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan RAD AMPL adalah untuk memberikan informasi tentang:

- Tingkat pencapaian target kinerja program dan kegiatan RAD AMPL berdasarkan hasil pelaksanaan tahun per tahun sampai dengan 2024.
- Rekomendasi langkah tindak lanjut pada OPD tahun berikutnya

- Perbaikan/penyesuaian yang diperlukan terhadap program/kegiatan RAD AMPL untuk tahun pelaksanaan berikutnya

6.1. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

Mekanisme pemantauan dan evaluasi RAD AMPL mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap RAD AMPL dilaksanakan sebagai berikut :

A. Materi Pemantauan dan Evaluasi

1. Tingkat pencapaian target kinerja program pada tahun pelaksanaan dan kumulatif sampai dengan tahun pelaksanaan;
2. Tingkat penggunaan anggaran program pada tahun pelaksanaan dan kumulatif sampai dengan tahun pelaksanaan.

B. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi

1. Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilakukan minimal 2 kali dalam setahun;
2. Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.

C. Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi

1. Kepala OPD kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD AMPL yang menjadi tanggung jawab OPD masing-masing;
2. Kepala OPD melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL (Pokja RAD AMPL) menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda selaku Ketua TKK;
3. Masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL atas kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan daerah;

4. Tim Teknis Penyusun RAD AMPL menghimpun dan menganalisis laporan seluruh OPD pelaksana RAD AMPL dan masyarakat dan melaporkannya kepada Kepala Bappeda;
5. Kepala Bappeda Kabupaten melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Teknis Penyusun RAD AMPL;
6. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala OPD;
7. Kepala OPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Bappeda;
8. Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati..

D. Peran DPRD dalam Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL

1. Mengadakan pembahasan (misalnya melalui rapat kerja, rapat komisi) hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program AMPL;
2. Mendorong dilaksanakannya pemantauan dan evaluasi RAD AMPL;
3. Memastikan adanya alokasi program dan anggaran untuk pengembangan kapasitas dan kompetensi KPSPAM dalam menyediakan pelayanan air minum dan sanitasi perdesaan.

Petunjuk Pengisian:

1. Kolom (1) diisi dengan nomor urutan pengisian
2. Kolom (2) diisi dengan sasaran AMPL 2019 sebagaimana tercantum dalam Tabel Tujuan dan Sasaran Pembangunan AMPL Kabupaten s.d. 2021
3. Kolom (3) diisi dengan program yang dilaksanakan untuk setiap sasaran. Setiap program diikuti dengan kegiatannya
4. Kolom (4) diisi dengan indikator outcome program untuk baris program dan indikator output kegiatan untuk baris kegiatan
5. Kolom (5) diisi dengan data outcome program untuk baris program dan data output kegiatan untuk baris kegiatan sesuai data tahun terakhir yang digunakan pada penyusunan RAD AMPL
6. Kolom (6) K diisi dengan target outcome program untuk baris program dan target output kegiatan untuk baris kegiatan sampai dengan 2019.
7. Kolom (7) Rp diisi dengan perkiraan anggaran program untuk baris program dan perkiraan anggaran kegiatan untuk baris kegiatan pada tahun 2017
8. Kolom (8) sampai dengan kolom (11) diisi dengan cara yang sama dengan kolom (7)
*Total target kinerja pada Kolom (7) sd Kolom (11) harus sama dengan target kinerja pada Kolom (6), demikian juga dengan target anggaran.
Penulisan target kinerja pada Kolom (7) sd Kolom (11) dapat berupa target kumulatif dimana target pada tahun terakhir harus sama dengan target pada kolom (6), demikian juga dengan target anggaran. Jika penulisan target kinerja pada Kolom (7) sd (11) dilakukan secara kumulatif, maka penghitungan realisasi capaian pada Kolom (12) sd (16) juga harus secara kumulatif.*
9. Kolom (12) K diisi dengan realisasi outcome program untuk baris program dan realisasi output kegiatan untuk baris kegiatan pada tahun 2017
10. Kolom (13) sampai dengan kolom (16) diisi dengan cara yang sama dengan kolom (12)
11. Kolom (17) K diisi dengan rasio (perbandingan) antara Kolom (12) K dengan Kolom (7) K, dinyatakan dalam persentase
Kolom (17) Rp diisi dengan rasio (perbandingan) antara Kolom (12) Rp dengan Kolom (7) Rp, dinyatakan dalam persentase
12. Kolom (18) sampai dengan kolom (21) diisi dengan cara yang sama dengan kolom (17)
13. Kolom (22) diisi dengan OPD pelaksana/penanggung jawab kegiatan
14. Baris “Rata-rata capaian kinerja” diisikan dengan rata-rata rasio capaian seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada tahun yang dievaluasi
15. Baris “Predikat kinerja” diisikan dengan predikat yang disepakati oleh daerah, misalnya sangat rendah jika rata-rata rasio kurang dari 30%, rendah jika rata-rata rasio antara 30%-60%, cukup jika rata-rata rasio antara 60%-80%, dan tinggi jika rata-rata rasio lebih dari 80%.

16. Baris “Faktor pendorong pencapaian kinerja” diisikan dengan faktor-faktor yang dinilai perlu dipertahankan agar kinerja dapat dipertahankan/ditingkatkan
17. Baris “Faktor penghambat” diisikan dengan faktor-faktor yang dinilai harus diatasi/diminimalisir pada tahun pelaksanaan berikutnya
18. Baris “Usulan tindak lanjut pada OPD berikutnya” diisikan dengan rekomendasi tindak lanjut dalam bentuk kebijakan, prosedur pelaksanaan, program, kegiatan, atau penambahan/pengurangan anggaran program/kegiatan pada OPD berikutnya

BAB VII

PENUTUP

Tujuan pembangunan AMPL yang ditargetkan tercapai di akhir tahun 2023 dapat dijadikan sebagai salah satu pemacu dan semangat untuk dapat melakukan upaya yang lebih baik dalam mensejahterakan masyarakat. Penanggulangan permasalahan air minum dan penyehatan lingkungan bukanlah masalah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara saja, namun oleh seluruh masyarakat, termasuk masyarakat yang menjadi sasaran.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mendukung dan melaksanakan upaya pembangunan AMPL. Komitmen tersebut telah tertuang di dalam dokumen-dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah maupun tahunan, dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan serta berbagai sumber dana melalui strategi penanganan langsung maupun tidak langsung.

Koordinasi diantara stakeholders maupun instansi sangat perlu dioptimalkan, terutama dalam hal pencapaian target dan sasaran program kegiatan AMPL secara berjenjang dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa sampai ke tingkat kelompok sasaran. Hal ini dilakukan melalui mekanisme maupun siklus perencanaan dan penganggaran tahunan daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan RAD AMPL perlu didukung oleh upaya *penciptaan tata pemerintahan yang baik*, yaitu sebuah tata pemerintahan yang mengedepankan hubungan sinergi antara elemen-elemen pemerintah, swasta dan masyarakat sipil dengan melibatkan masyarakat itu sendiri berdasarkan prinsip-prinsip partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan pada pengutamakan kepentingan masyarakat.

Pelaksanaan RAD AMPL ini memerlukan dukungan dan peran serta seluruh pelaku pembangunan dari kalangan pemerintah, DPRD, perguruan tinggi, organisasi dan lembaga swadaya masyarakat, swasta dan lembaga internasional. Keterlibatan dan dukungan ini diharapkan terus berlanjut sampai pada pelaksanaan RAD AMPL dan evaluasi pencapaian hasil RAD AMPL. Keterlibatan seluruh pelaku pembangunan

diharapkan akan mendorong terbangunnya sebuah kesamaan cara pandang, kesepakatan dan sinergi dalam melakukan upaya Percepatan Pencapaian Target AMPL Kabupaten Penajam Paser Utara.

Dokumen RAD AMPL ini merupakan acuan bagi seluruh pelaku pembangunan baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat dalam melakukan upaya peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi Kabupaten Penajam Paser Utara sampai dengan Tahun 2023 mendatang. Dokumen ini terbuka untuk perubahan/penyesuaian berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya. Dokumen RAD AMPL ini diharapkan mampu menjadi pemandu arah bagi peningkatan kapasitas dan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi Kabupaten Penajam Paser Utara, menuju sasaran yaitu Universal Access di bidang air minum dan sanitasi di tahun 2019 serta Sustainable Development Goals 2030.

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAPUR MAS'UD

LAMPIRAN RAD AMPL

No	Sasaran AMPL 2018	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pd Awal Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Target RAD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun					OPD	
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
	dan Kesehatan	Penyakit Menular	melakukan skrining kesehatan																			
6	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Program Upaya Kesehatan Esensial	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100%	100%	2.735.396.000	100%	2.735.396.000	-	-	-	-	-	-	-							
7	Terwujudnya Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Persentase jalan yang memiliki drainase	13%	61%	58.209.208.000,00	19%	21.911.608.000	30%	5.693.600.000	40%	10.000.000.000	50%	10.200.000.000	61%	10.404.000.000						
8	Terwujudnya Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan	Program pengendalian banjir	Persentase jalan yang memiliki drainase	13%	61%	14.407.000.000,00	19%	465.400.000	30%	1.700.000.000	40%	4.000.000.000	50%	4.080.000.000	61%	4.161.600.000						
9	Terwujudnya Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase Cakupan Sanitasi (Septik Komunal) Pemukiman Terbangun (%)	20%	4,7%	2.026.136.000,00	1,6%	106.450.000	0,8%	701.000.000	0,8%	500.000.000	0,8%	510.000.000	0,8%	208.686.000						
10	Terwujudnya Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan	Program Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	Panjang Saluran Drainase/ Gorong-gorong Permukiman terbangun (meter)	61.420	92.130	4.520.000.000,00	67.562	3.000.000.000	67.562	0	79.846	500.000.000	85.988	510.000.000	92.130	510.000.000						
11	Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Penataan Perumahan dan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Layak Huni (unit)	920	1.500	2.211.576.080,00	300	182.800.000	300	599.500.000	300	600.000.000	300	612.000.000	300	217.276.080						
12	Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Penataan Perumahan dan Permukiman	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Timbulan sampah yang tertangani	25,27%	90%	46.893.988.063,20	40%	8.720.308.000	60%	9.401.458.000	70%	9.401.458.000	80%	9.589.487.160	90%	9.781.276.903						
13	Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Penataan Perumahan dan Permukiman	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	IKLH	NA	75,65	1.371.327.726,20	68,5	219.593.000	69,50	479.692.309	70,50	219.593.000	71,50	223.984.860	73,50	228.464.557						
14	Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Penataan Perumahan dan Permukiman	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	IKLH	NA		729.222.000,00		44.132.000		164.822.000		170.000.000		173.400.000		176.868.000						
Rata-rata capaian kinerja (%)																						
Predikat kinerja																						
Faktor pendorong pencapaian kinerja:																						
Faktor penghambat:																						
Usulan tindak lanjut pada RKPD berikutnya:																						

			Pembangunan WTP Pedesaan (5 Unit)	Meningkatnya capaian pemenuhan kebutuhan air bersih				-	-	1 unit	3,000,000,000	2	6,000,000,000	1	8,000,000,000	1	3,000,000,000	5 unit	20,000,000,000		
			Perencanaan WTP Pedesaan	Tersedianya dokumen perencanaan Instalasi pengolahan air				-	-	1 dok	100,000,000	-	-	-	-	-	-	1 dok	100,000,000		
			Perencanaan Pemasangan Travo 200 KVA untuk PDAM Sepaku	Tersedianya dokumen perencanaan untuk pemasangan listrik PDAM Sepaku				-	-	1 dok	100,000,000	-	-	-	-	-	-	1 dok	100,000,000		
			Pemasangan Travo 200 KVA untuk PDAM Sepaku	Terpasangnya jaringan listrik PDAM Sepaku				-	-	1 unit	7,600,000,000	-	-	-	-	-	-	1 unit	7,600,000,000		
			Perencanaan Pemasangan Travo 200 KVA dan Jaringan Distribusi untuk PDAM Waru	Tersedianya dokumen perencanaan untuk pemasangan listrik PDAM Waru				-	-	1 dok	100,000,000	-	-	-	-	-	-	1 dok	100,000,000		
			Pemasangan Travo 200 KVA dan Jaringan Distribusi untuk PDAM Waru	Terpasangnya jaringan listrik PDAM Waru				-	-	1 unit	5,000,000,000	-	-	-	-	-	-	1 unit	5,000,000,000		
			Perencanaan Instalasi Pengolah Air (Water Treatment Plant) Kapasitas 10 ltr/dtk untuk 15 titik	Tersedianya dokumen perencanaan Instalasi pengolahan air				-	-	1 dok	100,000,000	-	-	-	-	-	-	1 dok	100,000,000		
			Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE 150, 75, 50 mm kawasan Desa Siderejo tembus Tanjung Jumblat	Tersedianya dokumen perencanaan Jaringan Pipa Air Bersih				-	-	-	-	1 dok	700,000,000	-	-	-	-	1 dok	700,000,000		
			Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE 150, 75, 50 mm kawasan Desa Giripurwa	Meningkatnya capaian pemenuhan kebutuhan air bersih				-	-	-	-	20 KM	7,000,000,000	-	-	-	-	20 KM	7,000,000,000		
			Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE 150, 75, 50 mm kawasan Desa Giripurwa	Tersedianya dokumen perencanaan Jaringan Pipa Air Bersih				-	-	-	-	-	1	700,000,000	-	-	-	1	700,000,000		
			Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE 150, 75, 50 mm kawasan Desa Girimukti	Meningkatnya capaian pemenuhan kebutuhan air bersih				-	-	-	-	-	25KM	5,000,000,000	-	-	-	15 KM	5,000,000,000		
			Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE 150, 75, 50 mm kawasan Desa Girimukti	Tersedianya dokumen perencanaan Jaringan Pipa Air Bersih				-	-	-	-	-	-	-	1	700,000,000	-	1	700,000,000		
			Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE 150, 75, 50 mm kawasan Desa Girimukti	Meningkatnya capaian pemenuhan kebutuhan air bersih				-	-	-	-	-	-	-	30 KM	5,000,000,000	-	15 KM	5,000,000,000		
			Lanjutan Pembangunan WTP (Multiyears)	Meningkatnya capaian pemenuhan kebutuhan air bersih				1	24,383,305,300	5000 m	-	-	-	-	-	-	-	-	24,383,305,300		
			Lanjutan Pembangunan Jaringan Distribusi Air Bersih (Multiyears)	Meningkatnya capaian pemenuhan kebutuhan air bersih				1	18,875,682,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,875,682,500		
			Kegiatan Pamsimas Kab. Penajam Paser Utara (2 Desa)	Meningkatnya capaian pemenuhan kebutuhan air bersih			2 Desa	500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 Desa	500,000,000		
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat		Output : Cakupan Indikator pelayanan promosi dan pemberdayaan masyarakat Outcome : Meningkatkan kualitas pelayanan				90%	1	100,000,000	1	125,000,000	1	130,000,000	1	135,000,000	1	140,000,000			
			Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Outcome: Tersedianya media promosi dan informasi sadar hidup sehat baik melalui media cetak maupun elektronik Output: Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat			7 Kegiatan	10 kegiatan	200,000,000	10 kegiatan	200,000,000	12 kegiatan	240,000,000	12 kegiatan	240,000,000	13 kegiatan	260,000,000	13 kegiatan	1,140,000,000	Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinkes

			Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Outcome: Terlaksananya penyuluhan dan advokasi ke seluruh elemen masyarakat mengenai pola hidup sehat Output: Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan			7 Kegiatan	24 kegiatan	112,200,000	30 kegiatan	140,250,000	32 kegiatan	149,600,000	35 kegiatan	163,625,000	35 kegiatan	165,000,000	35 kegiatan	730,675,000	Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinkes	
			Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan	Outcome: Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi tenaga penyuluh kesehatan Output: Meningkatnya kualitas SDM Penyuluh Kesehatan			4 orang	3 orang	24,000,000	2 orang	16,000,000	2 orang	20,000,000	2 orang	20,000,000	2 orang	20,000,000	11 orang	100,000,000	Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinkes	
			Pemanfaatan Dana Desa	Outcome: Terlaksananya kegiatan kesehatan di tingkat desa Output: Peningkatan pemanfaatan Dana Desa			5%	0	45,000,000	0	43,000,000	0	40,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000	0	198,000,000	Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinkes	
			Survei Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Outcome: Capaian survei perilaku hidup bersih dan sehat Output: Terukurnya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			60%	65%	255,000,000	70%	255,000,000	75%	260,000,000	80%	260,000,000	85%	265,000,000	85%		Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinkes	
			Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah	Outcome: Terlaksananya kegiatan pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah Output: Meningkatnya kualitas kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah			171 sekolah	45	90,000,000	40	81,000,000	30	72,000,000	30	72,000,000	26	63,000,000	171		Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinkes	
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Outcome: Terlaksananya kegiatan skrining kesehatan pada usia pendidikan dasar Output: Meningkatnya pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar			171 sekolah (100%)	171 sekolah (100%)	188,100,000	171 sekolah (100%)	197,500,000	171 sekolah (100%)	207,500,000	171 sekolah (100%)	217,500,000	171 sekolah (100%)	228,700,000	171 sekolah (100%)		Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinkes	
			Kebijakan Publik yang berwawasan kesehatan	Outcome: Tersedianya kebijakan publik berwawasan kesehatan Output: Adanya dasar hukum kebijakan publik yang berwawasan kesehatan			3 kebijakan	1 kebijakan	45,000,000	1 kebijakan	50,000,000	1 kebijakan	55,000,000	1 kebijakan	60,000,000	1 kebijakan	65,000,000	5 kebijakan		Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinkes	
Meningkatnya status kesehatan masyarakat	Peningkatan status kesehatan masyarakat	Program Perbaikan Gizi Masyarakat		Output : Cakupan balita gizi buruk Outcome : Cakupan Gizi masyarakat meningkat			100%	1	700,000,000	1	710,000,000	1	720,000,000	1	730,000,000	1	740,000,000					
			Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin untuk Ibu Hamil Kurang Gizi (Bumil KEK)	Output : Meningkatkan status gizi Ibu Outcome : Cakupan Bumil KEK			100%	1	400,000,000	1	400,000,000	1	400,000,000	1	400,000,000	1	400,000,000					
			Penurunan Stunting	Output : Menurunnya jumlah prevalensi balita stunting Outcome : Menurunnya jumlah kasus Stunting			414 Kasus	250 Kasus	800,000,000	200 Kasus	700,000,000	100 Kasus	600,000,000	50 Kasus	500,000,000	0 Kasus	400,000,000	150 Kasus				
	Pengembangan Lingkungan masyarakat hidup Sehat	Program Pengembangan Lingkungan Sehat		Output: Terwujudnya Kabupaten Sehat Outcome: Kecamatan/Desa/Kelurahan yang sehat			55.00%	1	100,000,000	1	120,000,000	1	150,000,000	1	170,000,000	1	200,000,000			Kesling	Dinke	
			Penyuluhan menciptakan Lingkungan sehat	Output: Tercapainya masyarakat yang sehat dan sarana prasarana yang memenuhi syarat kesehatan Outcome: Cakupan sarana air bersih, tempat-tempat umum			65.50%	1	70,000,000	1	85,000,000	1	110,000,000	1	115,000,000	1	120,000,000			Kesling	Dinke	

			Sosialisasi kebijakan Lingkungan sehat	Output: peningkatan pengetahuan masyarakat akan pentingnya hidup bersih dan sehat. Outcome: terlaksananya sosialisasi kebijakan lingkungan sehat.			0	1 kegiatan	20,000,000	1 kegiatan	20,000,000	1 kegiatan	20,000,000	1 kegiatan	120,000,000			Kesling	Dinke	
			Sanitasi Total berbasis Masyarakat	Output : adanya Desa / Kelurahan yang sudah melaksanakan STBM. Outcome : Terciptanya Desa / Kelurahan menjadi			14 Desa/kelurahan	16 Desa/kelurahan	15,000,000	20 Desa/kelurahan	20,000,000	25 Desa/kelurahan	25,000,000	30 Desa/kelurahan	30,000,000	35 Desa/kelurahan	35,000,000		Kesling	Dinke
			Pengawasan dan Pengujian kualitas Air Minum dan sarana penyediaan air minum	Output : Semua sarana Air Minum Laik Sehat. Outcome : Semua sarana dan SPAM diawasi dan diuji kualitas airnya.			0	15 titik	44,570,000	20 titik	50,000,000	25 titik	70,000,000	30 titik	80,000,000	35 titik	90,000,000		Kesling	Dinke
			Study Percepatan pembangunan sanitasi pemukiman (study ehra)	Output : adanya data pada buku putih sanitasi (Penetapan Area Beresiko dan strategi Sanitasi Kabupaten). Outcome : didapatkannya gambaran kondisi sanitasi			60%	1	100,000,000	1	120,000,000	1	150,000,000	1	170,000,000	1	200,000,000		Kesling	Dinke
	Lingkungan Sehat Perumahan		Lingkungan Sehat Perumahan	Output : Terciptanya pemukiman / perumahan yang memenuhi syarat kesehatan. Outcome : Terlaksananya pengawasan dan pembinaan pemukiman / perumahan.			64.80%	1	100,000,000	1	120,000,000	1	150,000,000	1	170,000,000	1	200,000,000		Kesling	Dinke
	pengawasan dan Pengendalian kesehatan makanan		pengawasan dan Pengendalian kesehatan makanan	Output : terciptanya rumah makan / restaurant yang hygiene sanitasi. Outcome : Rumah makan / Restaurant memenuhi syarat kesehatan (memiliki sertifikat laik hygiene			52.84%	1	100,000,000	1	120,000,000	1	150,000,000	1	170,000,000	1	200,000,000		Kesling	Dinke
Peningkatan jaringan saluran pembuang dengan lancar	Terbangunnya saluran drainase, gorong-gorong, pengendali banjir dan saluran pembuang lainnya	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - Gorong		Panjang saluran drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik			17,900	21,911,608,000	16,650	20,849,840,160	16,400	22,796,836,963	16,400	23,252,773,702	16,400	23,717,829,176	180,825	112,528,888,001	DPUTR	
			Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase (tersebar 4 Kecamatan)	Terpeliharanya drainase di 4 Kecamatan			500	672,500,000	1,500	1,793,600,000	1,500	1,972,960,000	1,500	1,972,960,000	1,500	1,972,960,000	15,000	8,384,980,000		
			Pembangunan Drainase RT. 04 Kel. Sungai Parit	Panjang saluran drainase yang terbangun			200	200,000,000	500	500,000,000	500	500,000,000	500	600,000,000	500	600,000,000	5,000	2,400,000,000		
			Pembangunan Saluran Pembuang Dusun II Gunung Intan Kec. Babulu	Panjang saluran drainase yang terbangun			900	900,000,000	500	556,240,160	300	400,000,000	300	619,813,702	300	619,813,702	4,000	3,095,867,564		
			Pembangunan Saluran Pembuang RT. 05 Gunung Mulia Kec. Babulu	Panjang saluran drainase yang terbangun			900	900,000,000	600	600,000,000	400	600,000,000	400	660,000,000	400	660,000,000	5,500	3,420,000,000		
			Pembangunan Saluran Pembuang Tambong - Sumber Sari Kec Babulu	Panjang saluran drainase yang terbangun			1,900	1,900,000,000	700	700,000,000	500	700,000,000	500	1,000,000,000	500	1,000,000,000	2,600	5,300,000,000		
			Pembangunan Saluran Pembuang RT. 07 Desa Sesulu Kec. Waru	Panjang saluran drainase yang terbangun			300	300,000,000	400	400,000,000	500	400,000,000	500	480,000,000	500	480,000,000	4,000	2,060,000,000		
			Pembangunan Saluran Pembuang RT. 04 Kel. Nenang	Panjang saluran drainase yang terbangun			200	199,250,000	400	400,000,000	500	400,000,000	500	420,000,000	500	420,000,000	4,200	1,839,250,000		
			Pembangunan Saluran Drainase RT. 06 dan RT. 22 Waru	Panjang saluran drainase yang terbangun			900	900,000,000	400	400,000,000	500	400,000,000	500	500,000,000	500	500,000,000	3,700	2,700,000,000		
			Pembangunan Lingkungan Permukiman RT. 04 Kel. Petung	Panjang saluran drainase yang terbangun			200	200,000,000	400	200,000,000	300	240,000,000	300	240,000,000	300	240,000,000	2,000	1,120,000,000		
			Peningkatan Drainase Lingkungan Perumahan RT. 07 Desa Sidorejo Kec. Penajam	Panjang saluran drainase yang terbangun			200	200,000,000	400	400,000,000	300	400,000,000	300	420,000,000	300	420,000,000	3,500	1,840,000,000		

			Peningkatan Drainase Gang Melati RT. 03 Desa Sidorejo	Panjang saluran drainase yang terbangun				200	200,000,000	400	400,000,000	300	400,000,000	300	420,000,000	300	420,000,000	3,500	1,840,000,000		
			Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman RT. 03 Kel. Petung	Panjang saluran drainase yang terbangun				200	200,000,000	400	400,000,000	300	400,000,000	300	480,000,000	300	480,000,000	4,000	1,960,000,000		
			Pembangunan Drainase RT. 02 Kel. Sungai Parit	Panjang saluran drainase yang terbangun				200	200,000,000	400	400,000,000	300	400,000,000	300	500,000,000	300	420,000,000	3,500	1,920,000,000		
			Pembangunan Drainase Jalan Abdul Gani Penajam	Panjang saluran drainase yang terbangun				200	200,000,000	200	200,000,000	200	200,000,000	200	240,000,000	200	240,000,000	2,000	1,080,000,000		
			Peningkatan Saluran Drainase RT. 10 Desa Giripurwa	Panjang saluran drainase yang terbangun				200	200,000,000	400	400,000,000	300	400,000,000	300	600,000,000	300	600,000,000	5,000	2,200,000,000		
			Pembangunan Saluran Pembuang RT. 04 Desa Rintik Kec. Babulu	Panjang saluran drainase yang terbangun				200	150,000,000	400	400,000,000	300	400,000,000	300	840,000,000	300	840,000,000	7,000	2,630,000,000		
			Peningkatan Saluran Drainase Rt. 21 Kel. Waru	Panjang saluran drainase yang terbangun				300	259,858,000	400	400,000,000	300	400,000,000	300	420,000,000	300	420,000,000	3,500	1,899,858,000		
			Pembangunan Saluran Pembuang RT. 03 Kel. Nenang	Panjang saluran drainase yang terbangun				200	200,000,000	500	500,000,000	300	500,000,000	300	600,000,000	300	600,000,000	5,000	2,400,000,000		
			Pembangunan Saluran Pembuang Jalan Daeng Ma'gu Rt. 01 Nipah-nipah	Panjang saluran drainase yang terbangun				200	200,000,000	500	500,000,000	300	500,000,000	300	900,000,000	300	900,000,000	7,500	3,000,000,000		
			Pembangunan Saluran Pembuang RT. 04 Desa Girimukti	Panjang saluran drainase yang terbangun				300	300,000,000	500	500,000,000	300	500,000,000	300	600,000,000	300	600,000,000	5,000	2,500,000,000		
			Pembangunan Saluran Pembuang KM. 03 RT. 01 Kel. Penajam	Panjang saluran drainase yang terbangun				300	230,000,000	400	400,000,000	300	420,000,000	300	420,000,000	300	420,000,000	3,500	1,890,000,000		
			Saluran Drainase Jalan Lingkungan Rt. 11, RT. 12, RT. 13 Desa Gunung Intan (Bankeu TA.2019)	Panjang saluran drainase yang terbangun				1,000	1,000,000,000	500	600,000,000	500	600,000,000	500	600,000,000	500	600,000,000	5,000	3,400,000,000		
			Peningkatan Saluran Pembuangan RT.03 Gersik (Bankeu TA.2019)	Panjang saluran drainase yang terbangun				200	200,000,000	500	500,000,000	500	813,876,963	500	840,000,000	500	840,000,000	7,000	3,193,876,963		
			Pembangunan Drainase RT.12 dan 13 Kenangan arah Babulu Laut (Bankeu TA.2019)	Panjang saluran drainase yang terbangun				1,000	1,000,000,000	750	800,000,000	600	840,000,000	600	840,000,000	600	1,200,000,000	7,000	4,680,000,000		
			Pmbangunan Saluran Pembuang RT.24 Kelurahan Waru (Bankeu TA.2019)	Panjang saluran drainase yang terbangun				500	500,000,000	500	500,000,000	700	840,000,000	700	840,000,000	700	840,000,000	7,000	3,520,000,000		
			Pembangunan Saluran Pembuang Desa Sesulu RT.02 (Bankeu TA.2019)	Panjang saluran drainase yang terbangun				500	500,000,000	500	500,000,000	500	600,000,000	500	600,000,000	500	600,000,000	5,000	2,800,000,000		
			Pembangunan Saluran Pembuang Jl.Cendana Desa Bangun Mulya Kec.Waru (Bankeu TA.2019)	Panjang saluran drainase yang terbangun				1,000	2,000,000,000	600	600,000,000	500	600,000,000	500	1,000,000,000	500	1,000,000,000	5,000	5,200,000,000		
			Lanjutan Saluran Pembuang Desa Sumber Sari Kec.Babulu (Bankeu TA.2019)	Panjang saluran drainase yang terbangun				1,000	2,000,000,000	600	600,000,000	500	600,000,000	500	900,000,000	500	1,085,055,474	5,000	5,185,055,474		
			Pembangunan Saluran Pembuang Desa Rawa Mulya Kec. Babulu (Bankeu TA.2019)	Panjang saluran drainase yang terbangun				1,000	2,000,000,000	600	600,000,000	500	600,000,000	500	900,000,000	500	900,000,000	5,000	5,000,000,000		
			Pembangunan Saluran Pembuang Desa Sidorejo Kec.Penajam (Bankeu TA.2019)	Panjang saluran drainase yang terbangun				1,000	1,000,000,000	600	600,000,000	500	600,000,000	500	600,000,000	500	600,000,000	5,000	3,400,000,000		
			Lanjutan Saluran Pembuang Desa Gunung Mulia Kec.Babulu (Bankeu TA.2019)	Panjang saluran drainase yang terbangun				1,000	2,000,000,000	600	600,000,000	500	600,000,000	500	600,000,000	500	600,000,000	5,000	4,400,000,000		
			Lanjutan Drainase Samping Pasar RT.02 Nenang (Bankeu TA.2019)	Panjang saluran drainase yang terbangun				1,000	1,000,000,000	600	600,000,000	500	600,000,000	500	600,000,000	500	600,000,000	5,000	3,400,000,000		
			Pembangunan Saluran Pembuang Rt.14-15 Desa Girimukti	Panjang saluran drainase yang terbangun						600 m	2,700,000,000	500	2,970,000,000	500		500		3,750	5,670,000,000		

			Pembangunan Drainase Rt.08 Nenang	Panjang saluran drainase yang terbangun					300 m	300,000,000	400	500,000,000	400	500,000,000	400	500,000,000	3,250	1,800,000,000			
			Pembangunan Drainase Rt.09 Jl. Turunan di Lokasi Pemakaman Kel. Nipah-nipah	Panjang saluran drainase yang terbangun					300 m	300,000,000	400	500,000,000	400	500,000,000	400	500,000,000	4,000	1,800,000,000			
			Pembangunan Drainase Rt.03 Kel. Waru	Panjang saluran drainase yang terbangun					300 m	300,000,000	400	500,000,000	400	500,000,000	400	500,000,000	4,350	1,800,000,000			
			Pembangunan Drainase Rt.08 Kel. Waru	Panjang saluran drainase yang terbangun					300 m	300,000,000	400	500,000,000	400	500,000,000	400	500,000,000	5,475	1,800,000,000			
	Terwujudnya penataan perumahan kawasan permukiman yang layak huni	Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Penataan kawasan dan pembangunan perumahan MBR	Outcome : Tercapainya peningkatan kualitas hidup MBR Output : Terbangunnya rumah layak huni untuk			Terbangunnya perumahan 50 unit di kec. Sepaku	-	10,000,000,000	-	10,000,000,000	-	10,000,000,000	-	11,000,000,000	-	12,000,000,000	200 unit	53,000,000,000	Bidang Perkim	Kab. PPU
	Terwujudnya penataan perumahan kawasan permukiman yang layak huni	Lingkungan Sehat Perumahan	Penetapan kebijakan strategi dan program perumahan	Outcome : Tersedianya sarana perumahan dan permukiman Output : Terbangunnya saluran drainase dan			-	1 Paket	3,000,000,000	-	3,000,000,000	-	3,500,000,000	-	4,000,000,000	-	5,000,000,000	27 Paket	18,500,000,000	Bidang Perkim	Kab. PPU
	Terwujudnya penataan perumahan kawasan permukiman yang layak huni	Lingkungan Sehat Perumahan	Penetapan kebijakan strategi dan program perumahan	Outcome : Tersedianya database Output : adanya data kawasan dan kebutuhan sarana dan prasarannya			-	-	50,000,000	-	50,000,000	-	75,000,000	-	75,000,000	-	75,000,000	5 Dok	325,000,000	Bidang Perkim	Kab. PPU
	Terwujudnya penataan perumahan kawasan permukiman yang layak huni	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Pemeliharaan Taman Kota	Outcome : Tercapainya pengelolaan RTH publik Output : Terperuhnya kebutuhan RTH			Pengelolaan 10 kawasan RTH	-	3,000,000,000	-	3,000,000,000	-	3,500,000,000	-	4,000,000,000	-	5,000,000,000	-	18,500,000,000	Bidang Perkim	Kab. PPU
	Terwujudnya penataan perumahan kawasan permukiman yang layak huni	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Pemeliharaan Fasilitas Pembibitan	Outcome : Tercapainya pemeliharaan RTH Output : Tersedianya bibit tanaman			1 buah fas. Pembibitan	1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	1,350,000,000	Bidang Perkim	Kab. PPU
	Terwujudnya penataan perumahan kawasan permukiman yang layak huni	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik	Outcome : Tercapainya pemeliharaan RTH Output : Tersedianya bibit tanaman			-	-	-	2 kawasan	200,000,000	2 Kawasan	200,000,000	2 Kawasan	300,000,000	2 Kawasan	300,000,000	2 Kawasan	1,000,000,000	Bidang Perkim	Kab. PPU